

# **RENCANA KERJA RENJA 2023**



**BIRO PEMERINTAHAN  
SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR  
TAHUN 2022**



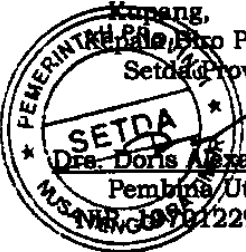


## KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas penyertaan-Nya penyusunan Rencana Kerja (Renja) Biro Pemerintahan Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2023 ini dapat diselesaikan dengan baik.

Rencana Kerja (Renja) Biro Pemerintahan Setda Provinsi NTT Tahun 2023 ini merupakan dokumen perencanaan tahun kelima periode Renstra Tahun 2018-2023 yang bertujuan sebagai pedoman pelaksanaan program dan kegiatan. Rencana Kerja Tahun 2023 menggambarkan pencapaian Rencana Strategis (Renstra) Biro Pemerintahan Setda Provinsi NTT Tahun 2018-2023. Penyusunan Rencana Kerja ini diharapkan dapat mendorong keberhasilan pencapaian target kinerja Biro Pemerintahan Setda Provinsi NTT pada tahun 2023.

Penyusunan Renja Tahun 2023 berpedoman pada Renstra Perubahan Biro Pemerintahan Tahun 2018-2023, Rancangan Awal RKPD, dan Pedoman Penyusunan Renja.

Kupang, April 2022  
Kepala Biro Pemerintahan  
Setda Provinsi NTT,  
  
Drs. Doris Alexander Rihi, M.Si  
Pembina Utama Muda  
NIP. 197012291990031005



# DAFTAR ISI

Halaman

Kata Pengantar  
Daftar Isi

BAB I	PENDAHULUAN	
1.1	Latar Belakang .....	1
1.2	Landasan Hukum .....	4
1.3	Maksud dan Tujuan .....	7
1.4	Sistematika Penulisan .....	8
BAB II	HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA BIRO PEMERINTAHAN SETDA PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR	
2.1	Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2021 dan Capaian Renstra Tahun 2021 .....	11
BAB III	TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH	
3.1	Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional .....	44
3.2	Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah.....	47
BAB IV	RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH .....	53
BAB V	PENUTUP .....	63

## **BAB I**

# **PENDAHULUAN**

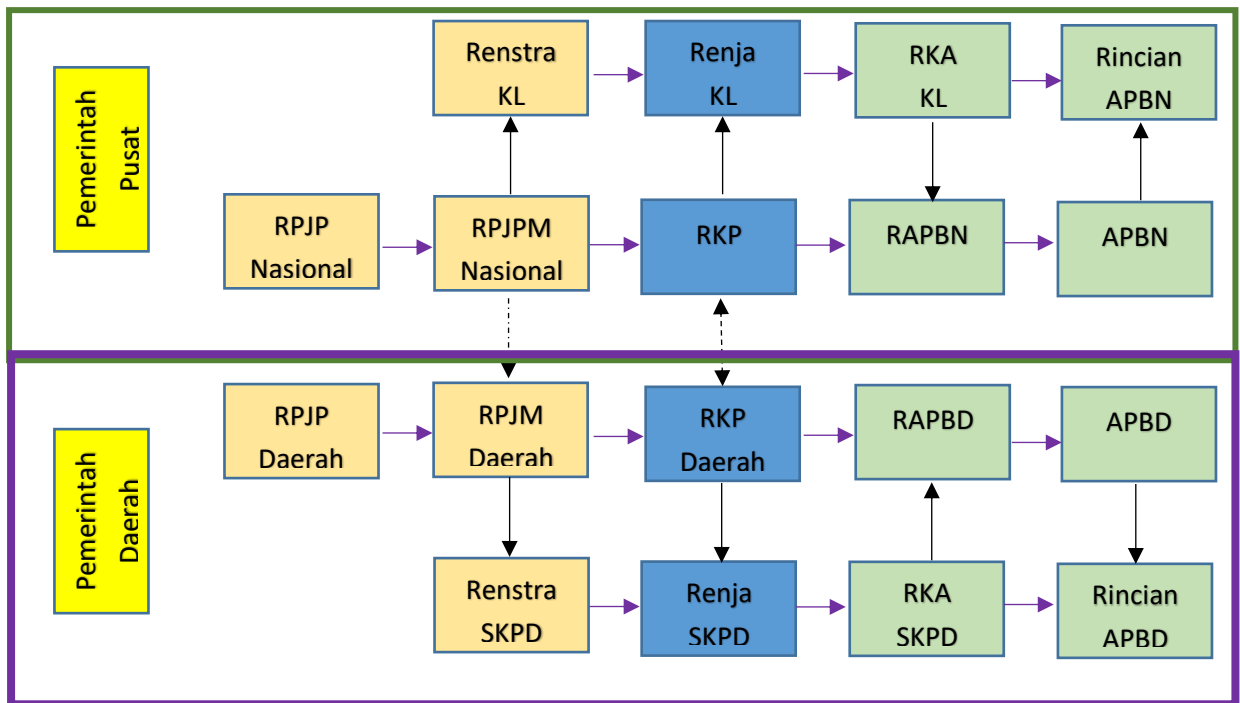
### **1.1. Latar Belakang**

Berdasarkan pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, perencanaan adalah sebagai suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumberdaya yang tersedia. Kemudian Pasal 1 angka 3 Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 mendefinisikan Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional sebagai satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat Pusat dan Daerah.

Alur perencanaan pembangunan kemudian berjalan sinergis dengan alur penganggaran, baik di tingkat Pusat maupun Daerah. Pada tingkat perencanaan Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional diacu dalam penyusunan RPJP Daerah. RPJP Daerah selanjutnya menjadi pedoman penyusunan Rencana Jangka Panjang Menengah (RPJM) Daerah, yang selanjutnya dijabarkan dalam RKP (Rencana Kerja Pemerintah) Daerah. RPJM Daerah dan RKP Daerah tersebut kemudian menjadi pedoman dalam

penyusunan Renstra dan Renja SKPD. Secara ringkas, alur perencanaan dan penganggaran dalam Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dijelaskan pada gambar berikut.

**Gambar 1.1. Alur Perencanaan dan Penganggaran dalam Sistem Perencanaan Nasional**



RPJPD Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2005-2025 menjadi bagian penting dalam mewujudkan pembangunan 5 (lima) tahunan periode kedua dari RPJMD Provinsi Nusa Tenggara Timur 2018-2023.

Penyusunan RKPD Tahun 2023 merupakan dokumen perencanaan tahun keempat dari RPJMD Provinsi NTT Tahun 2018 – 2023, dengan rancangan tema RKPD Provinsi Nusa

Tenggara Timur Tahun 2023 yaitu “Pemulihan kesehatan dan ekonomi untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan kemandirian lokal”. Berdasarkan rancangan tema tersebut, maka diusulkan pula kepada Gubernur dan Wakil Gubernur 6 (enam) Prioritas Daerah RKPD Tahun 2023, yaitu:

1. Pengembangan sumber daya local dan kolaborasi dalam menguatkan rantai nilai pariwisata untuk meningkatkan daya saing industri pariwisata berbasis masyarakat;
2. Penguatan sistem kesehatan daerah dan peningkatan kualitas pendidikan untuk menciptakan sumber daya manusia sehat, tangguh, cerdas, berintegritas, dan produktif;
3. Transformasi sektor pertanian berbasis kolaboratif untuk meningkatkan produktivitas, ketahanan pangan, pendapatan petani/nelayan dan perluasan lapangan kerja;
4. Pemantapan kualitas infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik;
5. Pengembangan kompetensi ASN dan penerapan Sistem Informasi Berbasis Elektronik (SPBE) serta inovasi untuk meningkatkan kinerja birokrasi; dan
6. Pembangunan rendah karbon dengan memanfaatkan energi baru terbarukan, pelestarian lingkungan hidup serta perubahan iklim dan kesiapsiagaan menghadapi multi bencana.

RKPD yang telah ditetapkan digunakan sebagai landasan penyusunan KUA dan PPAS dalam rangka penyusunan



Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Dalam perumusan program, kegiatan, indikator kinerja dan dana indikatif dalam Rancangan Renja Biro Pemerintahan Tahun Anggaran 2023, mengacu kepada rencana program prioritas pada rancangan awal RKPD Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2023. Selanjutnya Rancangan Renja Biro Pemerintahan Tahun 2023 dijadikan salah satu bahan dalam penyusunan RKPD Provinsi NTT Tahun 2023 yang nantinya menjadi dasar dalam penyusunan rancangan Kebijakan Umum APBD (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2023. Pagu indikatif perangkat daerah berpedoman pada RPJMD – P Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018-2023, sedangkan Program Non Urusan pagu indikatif yang digunakan sama dengan tahun 2021 sebelum *refocussing*.

## **1.2. Landasan Hukum**

Dasar hukum penyusunan Renjana Kerja Biro Pemerintahan Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003

Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2008 – 2028;
12. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah

Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 4 Tahun 2019 tentang RPJMD Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018 – 2023;

13. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2021 Nomor 002, tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 0117);
14. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

### **1.3. Maksud dan Tujuan**

#### **a. Maksud**

1. Memberikan arahan, acuan, dan pedoman bagi pelaksanaan program dan kegiatan untuk tercapainya sasaran dan tujuan;
2. Mengefektifkan dan mengarahkan proses pelaksanaan program dan kegiatan dalam mencapai tujuan yang dituangkan dalam perencanaan kinerja tahunan.

#### **b. Tujuan**

Tersusunnya perencanaan daerah yang komprehensif, transparan, akuntabel, partisipatif serta selaras dengan Visi

dan Misi Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur.

#### **1.4. Sistematika Penulisan**

Rencana Kerja Biro Pemerintahan Setda Provinsi NTT Tahun 2023 ini disusun dengan sistematika sebagai berikut:

Bab I.       Pendahuluan

Menguraikan tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan Rencana Kerja.

Bab II.      Hasil Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah

Bab ini memuat kajian (*review*) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2020 dan Tahun 2021, mengacu pada APBD tahun 2022. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Perangkat Daerah berdasarkan realisasi program dan kegiatan pada tahun sebelumnya.

Bab III.     Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

Telaahan terhadap kebijakan nasional dan provinsi sebagaimana merupakan penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan provinsi yang terkait dengan tugas dan fungsi PD. Telaahan terhadap

kebijakan nasional dan provinsi yang dimaksudkan untuk mewujudkan sinkronisasi antara dokumen perencanaan nasional dan daerah, sehingga diharapkan program dan kegiatan PD dapat diarahkan untuk mendukung sasaran pembangunan nasional maupun provinsi. Telaahan kebijakan nasional di kaitkan RPJMN 2020-2024 sedangkan telaahan kebijakan provinsi dapat dikaitkan dengan RPJMD Perubahan (RPJMD-P) Provinsi NTT Tahun 2018-2023

#### Bab IV. Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah

Berisikan penjelasan mengenai faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan, uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan, dan penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD, baik jenis program/kegiatan, pagu indikatif

#### Bab V. Penutup

Berisikan uraian penutup berupa catatan penting yang mendapat perhatian, kaidah-kaidah pelaksanaan, dan rencana tindak lanjut.

## **BAB II**

### **HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA BIRO PEMERINTAHAN SETDA PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

Evaluasi pelaksanaan Renja tahun 2021 dilakukan dengan membandingkan antara target program-kegiatan pada Renstra Biro Pemerintahan Setda Provinsi NTT dengan realisasi pelaksanaan program-kegiatan pada tahun 2021, kemudian memperkirakan realisasi capaian target dalam Rencana Strategis (Renstra) pada tahun berjalan. Dengan demikian diperoleh informasi mengenai realisasi program kegiatan yang tidak mencapai target, kemudian program kegiatan yang mencapai target, serta program kegiatan yang melampaui target pada tahun 2021. Disamping itu, evaluasi juga dilakukan terhadap keadaan pegawai pada Biro Pemerintahan Setda Provinsi NTT beserta dengan analisis kebutuhan pegawai (data per tanggal 31 Desember tahun 2021), serta keadaan sarana dan prasarana pada Biro Pemerintahan Setda Provinsi NTT pada tahun anggaran 2021.

#### **2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2021 dan Capaian Renstra Tahun 2021**

Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Biro Pemerintahan Setda Provinsi NTT selanjutnya dipergunakan untuk menentukan program kegiatan yang tidak mencapai target, kemudian program kegiatan yang mencapai target, serta program kegiatan yang melampaui target pada tahun 2021. Penentuan didasarkan pada kolom 8 atau kolom persentase Tingkat Realisasi (Realisasi Renja SKPD tahun 2021 dibagi dengan Target Renja SKPD tahun 2021).

**Tabel 2.1.**  
**Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Biro Pemerintahan Setda Provinsi NTT**  
**dan Pencapaian Renstra Biro Pemerintahan Setda Provinsi NTT s.d. Tahun 2022**

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Capaian Kinerja Renstra PD Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran PD Tahun 2021			Target Program/Kegiatan Renja PD Tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Program/Kegiatan Renstra	
					Target Renja Tahun 2021	Realisasi Renja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<b>Program Penunjang Urusan pemerintahan Daerah Provinsi</b>	<b>Persentase peningkatan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi</b>	<b>100%</b>		<b>100%</b>	<b>100%</b>		<b>100%</b>	<b>100%</b>	100%
	<b>Perencanaan, penganggaran, dan evaluasi perangkat daerah</b>	<b>Tersedianya dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja</b>	<b>5 dokumen</b>		<b>5 dokumen</b>	<b>5 dokumen</b>		<b>5 dokumen</b>	<b>5 dokumen</b>	100%
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Tersedianya dokumen RKA Biro Pemerintahan Tahun 2022	1 dokumen		1 dokumen	1 dokumen		1 dokumen	1 dokumen	100%
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Tersedianya dokumen RKA Perubahan Biro Pemerintahan	1 dokumen		1 dokumen	1 dokumen		1 dokumen	1 dokumen	100%
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya dokumen evaluasi kinerja Biro Pemerintahan	3 dokumen		2 dokumen	2 dokumen		1 dokumen	2 dokumen	100%



Rencana Kerja Tahun 2022 Biro Pemerintahan Setda Provinsi NTT

	Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Tersedianya dokumen laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja Biro Pemerintahan	4 dokumen		100%	100%	100%	1 dokumen	1 dokumen	100%
	- Penyusunan laporan realisasi keuangan	Tersedianya dokumen laporan realisasi keuangan Biro Pemerintahan Tahun 2021	1 dokumen							
	<b>Administrasi kepegawaian perangkat daerah</b>	<b>Terlaksananya administrasi kepegawaian</b>	<b>12 bulan</b>		<b>12 bulan</b>	<b>12 bulan</b>	<b>100%</b>	-	-	100%
	Pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi	Terlaksananya pendidikan dan pelatihan pegawai di Biro Pemerintahan	12 bulan		12 bulan	12 bulan	100%	-	-	100%
	- Pendidikan dan pelatihan dalam daerah	Terlaksananya pendidikan dan pelatihan dalam daerah	12 bulan		12 bulan	12 bulan	100%	-	-	100%
	- Pendidikan dan pelatihan luar daerah	Terlaksananya pendidikan dan pelatihan luar daerah	12 bulan		12 bulan	12 bulan	100%	-	-	100%
	<b>Administrasi Umum Perangkat daerah</b>	<b>Terlaksananya kegiatan administrasi umum di Biro Pemerintahan</b>	<b>12 bulan</b>		<b>12 bulan</b>	<b>12 bulan</b>	100%	<b>12 dokumen</b>	<b>12 dokumen</b>	100%
	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	12 bulan		12 bulan	12 bulan	100%	12 dokumen	12 dokumen	100%
	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan	12 bulan		12 bulan	12 bulan	100%	12 dokumen	12 dokumen	100%
	Penyediaan bahan/material	Tersedianya bahan/material penunjang kegiatan di Biro Pemerintahan	12 bulan		12 bulan	12 bulan	100%	12 dokumen	12 dokumen	100%

Rencana Kerja Tahun 2022 Biro Pemerintahan Setda Provinsi NTT

	- Alat Tulis Kantor									
	- Alat Kebersihan									
	Fasilitasi kunjungan tamu	Terlaksananya fasilitasi kunjungan tamu	12 bulan		12 bulan	12 bulan	100%	12 dokumen	12 dokumen	100%
	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi di dalam dan luar daerah	12 bulan		0 kabupaten /kota	0	0%	12 dokumen	12 dokumen	100%
	<b>Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah</b>	<b>Terlaksananya pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah</b>	<b>6 unit</b>		4 unit	4 unit	100%	<b>6 unit</b>	<b>6 unit</b>	100%
	<b>Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah</b>	<b>Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintahan</b>	<b>12 bulan</b>		<b>12 bulan</b>	<b>12 bulan</b>	<b>100%</b>	<b>12 dokumen</b>	<b>12 dokumen</b>	100%
	Penyediaan jasa surat menyurat	Tersedianya jasa pengiriman surat menyurat dinas	12 bulan		12 bulan	12 bulan	100%	12 dokumen	12 dokumen	100%
	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tersedianya jasa pembayaran paket internet di Biro Pemerintahan	12 bulan		12 bulan	12 bulan	100%	12 dokumen	12 dokumen	100%
	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Tersedianya jasa pelayanan umum kantor	12 bulan		12 bulan	12 bulan	100%	12 dokumen	12 dokumen	100%
	<b>Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah</b>	<b>Terlaksananya pemeliharaan barang milik daerah</b>	<b>12 bulan</b>		<b>12 bulan</b>	<b>12 bulan</b>	<b>100%</b>	12 dokumen	12 dokumen	100%
	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	Tersedianya jasa pemeliharaan kendaraan perorangan dinas dan kendaraan dinas jabatan	12 bulan		12 bulan	12 bulan	100%	12 dokumen	12 dokumen	100%
	Pemeliharaan peralatan mesin lainnya	Terlaksananya pemeliharaan peralatan mesin	12 bulan		12 bulan	12 bulan	100%	12 dokumen	12 dokumen	100%
	<b>Program Pemerintahan dan Otonomi Daerah</b>									<b>100%</b>

Rencana Kerja Tahun 2022 Biro Pemerintahan Setda Provinsi NTT

	<b>Program Pemerintahan dan Otonomi Daerah</b>	<b>Cakupan kegiatan tugas pemerintahan yang dilaksanakan setiap tahun</b>	<b>100%</b>					<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>
	<b>Kegiatan Pelaksanaan Tugas Pemerintahan</b>	<b>Jumlah tugas pemerintahan yang dilaksanakan dalam satu tahun</b>	<b>8 Kegiatan</b>					<b>6 kegiatan</b>	<b>6 kegiatan</b>	<b>100%</b>
	<b>Pengelolaan Administrasi Kebijakan Pemerintahan</b>									
	Rapat koordinasi Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)	Terlaksananya rapat Koordinasi Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)	1 kali					-	-	
	Inventarisasi pemetaan urusan	Tersedianya data aset bekas milik asing di Provinsi NTT	12 dokumen					12 kabupaten	12 kabupaten	100%
	<b>Fasilitasi Pelaksanaan Pemerintahan Umum</b>									
	Rapat koordinasi pemerintahan umum	Terlaksananya rapat koordinasi pemerintahan umum	1 kali					-	-	
	Rapat koordinasi forum komunikasi pimpinan daerah (Forkopimda) Provinsi	Terlaksananya rapat koordinasi forum komunikasi pimpinan daerah (Forkopimda) Provinsi	2 kali					-	-	
	Inventarisasi masalah-masalah pemerintahan umum di kabupaten/kota	Tersedianya data inventarisasi masalah-masalah pemerintahan umum	22 dokumen					14 kabupaten	14 kabupaten	100%

Rencana Kerja Tahun 2022 Biro Pemerintahan Setda Provinsi NTT

	<b>Fasilitasi Penataan Wilayah</b> Fasilitasi pemekaran kelurahan/kecamatan	Terlaksananya fasilitasi pemekaran kecamatan/kelurahan	1 kali	1 kabupaten	1 kabupaten	100%		10 kabupaten/kota	10 kabupaten/kota	100%
	Fasilitasi penyelesaian batas daerah	Terlaksananya fasilitasi penyelesaian batas daerah	1 kali	4 Kabupaten	4 Kabupaten	100%		10 kabupaten/kota	10 kabupaten/kota	
	Koordinasi pendataan dan verifikasi unsur rupa bumi	Terlaksananya koordinasi pendataan dan verifikasi unsur rupa bumi	1 kali	6 Kabupaten	6 Kabupaten	100%		7 kabupaten	7 kabupaten	100%
	Penyusunan Profil Kecamatan	Tersedianya dokumen Profil Kecamatan Tahun 2021	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100%		1 dokumen	1 dokumen	100%
	<b>Program Pemerintahan dan Otonomi Daerah</b>	<b>Cakupan kegiatan otonomi daerah yang dilaksanakan setiap tahun</b>	<b>100%</b>					<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>
	<b>Kegiatan Pelaksanaan Otonomi Daerah</b>	<b>Jumlah tugas otonomi daerah, evaluasi, dan penyelenggaraan pemerintah yang dilaksanakan dalam satu tahun</b>	<b>10 Kegiatan</b>					<b>10 kegiatan</b>	<b>10 kegiatan</b>	100%
	<b>Fasilitasi Administrasi Kepala Daerah dan DPRD</b>							<b>4 kegiatan</b>	<b>4 kegiatan</b>	<b>100%</b>
	Fasilitasi Administrasi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah pada 3 Kabupaten/Kota	Terlaksananya fasilitasi administrasi kepala daerah dan wakil kepala daerah pada 3 kabupaten/kota	1 kali	1 kali	1 kali	100%		1 kali	1 kali	100%

Rencana Kerja Tahun 2022 Biro Pemerintahan Setda Provinsi NTT

	Fasilitasi Pelantikan penjabat kepala Daerah pada 3 Kabupaten/Kota	Terlaksananya fasilitasi pelantikan penjabat kepala daerah pada 3 kabupaten/kota	1 kali	3 kali	3 kali	100%		1 kali	1 kali	100%
	Fasilitasi Adminsitasi Pengusulan Penggantian Antarwaktu (PAW) Anggota DPRD Provinsi NTT	Terlaksananya fasilitasi pengusulan pengganti antar waktu (PAW) anggota DPRD Provinsi NTT	1 keg	1 keg	1 keg	100%		1 kali	1 kali	100%
	Fasilitasi administrasi Penetapan Keputusan Tentang PAW Anggota DPRD Kabupaten/Kota	Terlaksananya fasilitasi administrasi penetapan keputusan tentang PAW Anggota DPRD Kabupaten/Kota	22 SK	1 keg	1 keg	100%		1 kali	1 kali	100%
	Rapat Kerja Gubernur dengan para Bupati/Walikota se-NTT	Terlaksananya rapat kerja Gubernur NTT dengan para Bupati/Walikota se-NTT	1 kali	-	-	-		-	-	-
	Fasilitasi administrasi kunjungan kerja Anggota DPD RI dan DPR RI ke NTT	Terlaksananya administrasi kunjungan kerja Pejabat Daerah dan Pejabat Politik	1 kali	-	-	-		-	-	-
	Fasilitasi administrasi usulan ijin luar negeri Kepala Daerah dan Anggota DPRD Provinsi	Terlaksananya administrasi usulan ijin luar negeri Kepala daerah dan Anggota DPRD	2 kali	-	-	-		-	-	-
	<b>Evaluasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan</b>									
	Penyusunan LKPJ Tahun 2021	Tersedianya dokumen LKPJ Tahun 2021	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100%		1 dokumen	1 dokumen	100%
	Penyusunan LPPD Tahun 2021	Tersedianya dokumen LPPD Tahun 2021	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100%		1 dokumen	1 dokumen	100%

Rencana Kerja Tahun 2022 Biro Pemerintahan Setda Provinsi NTT

	Penyusunan SPM Tahun 2021	Tersedianya dokumen SPM Tahun 2021	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100%		1 dokumen	1 dokumen	100%
	Penyusunan Self Assessment LPPD Tahun 2021	Terlaksananya Self Assessment LPPD Tahun 2021	1 kali	1 dokumen	1 dokumen	100%		1 kali	1 kali	100%
	Penyusunan RLPPD dan Nota Pengantar LKPJ Tahun 2021	Terlaksananya penyusunan RLPPD dan Nota Pengantar LKPJ Tahun 2021	1 kali	1 dokumen	1 dokumen	100%		1 kali	1 kali	100%
	<b>Program Pemerintahan dan Otonomi Daerah</b>	<b>3. Cakupan kegiatan penataan urusan yang dilaksanakan setiap tahun</b>	<b>100%</b>					<b>100%</b>	<b>100%</b>	100%
	<b>Kegiatan Pelaksanaan Otonomi Daerah</b>	<b>Jumlah tugas penataan urusan yang dilaksanakan dalam satu tahun</b>	<b>10 kegiatan</b>							
	<b>Pengembangan Otonomi dan Penataan Urusan</b>									
	Rapat koordinasi kebijakan pengembangan otonomi daerah	Terlaksananya rapat koordinasi kebijakan pengembangan otonomi daerah	1 kali	-	-	-				
	Inventarisasi pemetaan urusan pemerintah provinsi dan kabupaten/kota	Tersedianya data inventarisasi pemetaan urusan pemerintah provinsi dan kabupaten/kota	2 kali	-	-	-		12 kabupaten	12 kabupaten	100%
	Fasilitasi dan koordinasi penyelenggaraan peringatan hari jadi provinsi NTT	Terlaksananya fasilitasi dan koordinasi penyelenggaraan peringatan hari jadi Provinsi NTT	1 kali	-	-	-		-	-	-
	<b>Program Pemerintahan dan Otonomi Daerah</b>	<b>Cakupan kerja sama daerah yang difasilitasi setiap tahun</b>	<b>100%</b>					<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>

Rencana Kerja Tahun 2022 Biro Pemerintahan Setda Provinsi NTT

	<b>Kegiatan Fasilitasi Kerjasama Daerah</b>	<b>Jumlah fasilitasi kerja sama yang dilaksanakan dalam satu tahun</b>	<b>16 kegiatan</b>					<b>16 kegiatan</b>	<b>16 kegiatan</b>	<b>100%</b>
	<b>Fasilitasi Kerjasama antar Pemerintah</b>									
	Rapat koordinasi kebijakan kerja sama antar pemerintah luar negeri	Terlaksananya kegiatan rapat koordinasi kebijakan kerja sama antar pemerintah luar negeri	4 kali	-	-	-		-	-	-
	Rapat koordinasi kebijakan kerja sama antar pemerintah dalam negeri	Terlaksananya kegiatan rapat koordinasi kebijakan kerja sama antar pemerintah dalam negeri	4 kali	-	-	-		-	-	-
	Monitoring dan evaluasi lembaga mitra internasional dan pembinaan kerja sama di kabupaten/kota	Terlaksananya monitoring dan evaluasi lembaga mitra internasional dan pembinaan kerja sama di kabupaten/kota	1 kali	10 kabupaten	10 kabupaten	100%		-	-	-
	Penyusunan buku profil lembaga mitra internasional/NGO	Tersedianya buku profil lembaga mitra internasional/NGO	1 Dokumen	-	-	-		-	-	-
	Monitoring dan evaluasi program Inovasi	Terlaksananya monitoring dan evaluasi program inovasi	1 kali	5 kabupaten	5 kabupaten	100%		5 kabupaten	5 kabupaten	100%
	Rapat Tim Working Group Peace Corps Tk. Provinsi NTT	Terlaksananya Rapat Tim Working Group Peace Corps Tk. Provinsi NTT	2 kali	-	-	-		-	-	-

Rencana Kerja Tahun 2022 Biro Pemerintahan Setda Provinsi NTT

	Mendampingi Gubernur/Wakil Gubernur dalam rangka kunjungan kerja ke luar negeri	Terlaksananya pendampingan kunjungan kerja Gubernur/Wakil Gubernur ke luar negeri	2 kali	-	-	-		-	-	-
	<b>Fasilitasi Kerjasama Badan Usaha/Swasta</b>							-	-	-
	Sosialisasi kebijakan kerja sama di kabupaten/kota	Terlaksananya sosialisasi kebijakan kerja sama di kabupaten/kota	1 kali	-	-	-				
	Rapat pembahasan kerja sama	Terlaksananya rapat koordinasi kerja sama badan usaha/swasta	3 kali	-		-		52 kali	-	
	Pengambilan data potensi daerah untuk data kerja sama	Tersedianya data potensi daerah untuk kerja sama	22 kabupaten /kota	-	-	-		14 kabupaten	-	100%
	<b>Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama</b>									-
	Honor Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah	Tersedianya honor Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	100%		-	-	-
	Pengambilan data potensi daerah untuk data kerja sama	Tersedianya data potensi daerah untuk kerja sama	1 kali	6 kabupaten	6 kabupaten	100%		-	-	-
	<b>Program Kesejahteraan Rakyat</b>	<b>Persentase peningkatan pelayanan kesejahteraan rakyat (kegiatan di bidang kesejahteraan rakyat yang dilaksanakan</b>	<b>100%</b>					<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>



	<b>Kegiatan Fasilitasi Pembinaan Mental Spiritual</b>	<b>Jumlah fasilitasi kegiatan keagamaan yang dilaksanakan dalam satu tahun</b>	<b>18 kegiatan</b>					<b>6 Kegiatan</b>	<b>6 Kegiatan</b>	100%
	<b>Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual</b>									
	Fasilitasi pelaksanaan MTQ Tingkat Provinsi	Terlaksananya kegiatan MTQ Tingkat Provinsi NTT	1 kali kegiatan	-						
	Fasilitasi pelaksanaan MTQ Tingkat Nasional	Terlaksananya kegiatan MTQ Tingkat Nasional	1 kali kegiatan	-						
	Workshop Utsawa Dharma Gita (UDG)	Terlaksananya kegiatan workshop Utsawa Dharma Gita (UDG)	1 kali kegiatan	-						
	Buka Puasa Bersama	Terlaksananya kegiatan buka puasa bersama	300 orang	-				1 kali	1 kali	100%
	Halal Bi Halal	Terlaksananya kegiatan Halal Bihalal	500 orang	-				1 kali	1 kali	100%
	Fasilitasi pelaksanaan kurban dalam rangka Hari Raya Idul Adha	Terlaksananya fasilitasi pelaksanaan kurban dalam rangka perayaan Hari Raya Idul Adha	22 kabupaten /kota	6 kabupaten /kota	6 kabupaten /kota	100%		1 kali	-	-

Rencana Kerja Tahun 2022 Biro Pemerintahan Setda Provinsi NTT

	Penyelenggaraan Urusan Haji	Tersedianya bantuan Ongkos Naik Haji untuk ASN Lingkup Pemerintah Provinsi NTT	1 orang		-	-	-	1 kali	-	-
	Pekan Suci (Samana Santa) Larantuka	Terlaksananya fasilitasi penyediaan tiket bagi umat Katolik dalam rangka pelaksanaan Pekan Suci Samana Santa	500 orang		-	-	-	-	-	-
	Natal Oikumene Lingkup Pemerintah Provinsi NTT	Terlaksananya perayaan Natal Oikumene	1000 orang		-	-	-	1 kali	-	-
	Fasilitasi Pesparawi Tingkat Nasional	Terlaksananya fasilitasi Pesparawi Tingkat Nasional	1 kali kegiatan		-	-	-	-	-	-
	Fasilitasi Pesparani Tingkat Provinsi	Terlaksananya fasilitasi Pesparani Tingkat Provinsi NTT	1 kali kegiatan		-	-	-	-	-	-
	Fasilitasi Peparani Tingkat Nasional	Terlaksananya fasilitasi Pesparani Tingkat Nasional	1 kali kegiatan		-	-	-	-	-	-
	Hari Raya Waisak	Terlaksananya perayaan Hari Raya Waisak	200 orang		-	-	-	1 kali	-	-
	Hari Raya Nyepi	Terlaksananya perayaan Hari Raya Nyepi	200 orang		-	-	-	1 kali	1 kali	100%
	Dialog Pemerintah Provinsi NTT dengan Lembaga Keagamaan	Terlaksananya dialog Pemerintah Provinsi NTT dengan Pimpinan Lembaga Keagamaan	120 orang		-	1 kali	100%	-	-	-
	Koordinasi kebijakan bidang agama	Terlaksananya koordinasi kebijakan bidang agama			-	-	-	8 kabupaten	-	-

	Dialog kerukunan Lintas Agama Se-daratan Sumba	Terlaksananya kegiatan Dialog Kerukunan Lintas Agama se daratan Sumba	120 orang		-	-	-	-	-	-
	<b>Kegiatan Fasilitas Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar</b>	<b>Jumlah fasilitas, koordinasi, sinkronisasi, dan evaluasi kegiatan bidang pelayanan dasar</b>	<b>14 kegiatan</b>					<b>6 Kegiatan</b>	<b>6 Kegiatan</b>	100%
	<b>Fasilitas Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi, dan Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pendidikan</b>									
	Studi Kelayakan dan Operasional Sekolah Tinggi Pariwisata	Tersedianya data hasil studi kelayakan dan operasional Sekolah Tinggi Pariwisata	4 kabupaten		-	-	-	-	-	
	Koordinasi dan Fasilitas Dokumen Study Kelayakan Sekolah Tinggi Pariwisata	Terlaksananya fasilitas dokumen hasil studi kelayakan Sekolah Tinggi Pariwisata	2 kali		-	-	-	1 kali	-	-
	Verifikasi Proposal Bantuan Sosial Beasiswa dan Bantuan Penelitian	Tersedianya data hasil verifikasi bantuan sosial beasiswa dan bantuan penelitian	12 bulan		-	-	-	12 bulan	12 bulan	100%
	Rakor Perguruan Tinggi Negeri dan Swasta se NTT	Terlaksananya rakor perguruan tinggi negeri dan swasta se NTT	67 Perguruan Tinggi		-	-	-	1 kali	1 kali	100%
	Monitoring dan evaluasi pelaksanaan koordinasi kebijakan bidang pendidikan di kabupaten/kota	Terlaksananya kegiatan monitoring dan evaluasi koordinasi kebijakan bidang pendidikan di kabupaten/kota	1 kali		14 kabupaten	14 kabupate n	100%	1 kali	1 kali	100%

	<b>Fasilitasi Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi, dan Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kesehatan</b>									
	Advokasi Tim Pembina UKS di Kabupaten/Kota se Provinsi NTT	Terlaksananya advokasi Tim Pembina UKS di Kabupaten/Kota se NTT	1 kali		-	-	-	-	-	
	Rapat Koordinasi Penanganan Masalah-masalah Kesehatan	Terlaksananya koordinasi penanganan masalah-masalah kesehatan	2 kali		-	-	-	1 kali	1 kali	100%
	<b>Fasilitasi Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi, dan Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Sosial</b>									
	Bantuan sosial dan hibah	Terlaksananya rapat koordinasi penanganan masalah-masalah sosial	2 kali		-	-	-	-	-	
	Monitoring dan evaluasi pelaksanaan koordinasi kebijakan bidang sosial di kabupaten/kota	Terlaksananya kegiatan monitoring dan evaluasi koordinasi kebijakan bidang sosial di kabupaten/kota	1 kali		-	-	-	-	-	
	<b>Kegiatan Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Non Dasar</b>	<b>Jumlah fasilitasi, koordinasi, sinkronisasi, dan evaluasi kegiatan bidang non pelayanan dasar</b>	<b>9 kegiatan</b>					<b>3 kegiatan</b>	<b>3 kegiatan</b>	<b>100%</b>

	<b>Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kepemudaan, Olah Raga, Kebudayaan, dan Pariwisata</b>									
	Rapat koordinasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata	Terlaksananya rapat koordinasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata	2 kali		-	-	-	-	-	
	Fasilitasi HUT Proklamasi RI	Terlaksananya fasilitasi Perayaan HUT Proklamasi RI	1 kali		1 kali	1 kali	100%	1 kali	1 kali	100%
	Fasilitasi Hari Lahir Pancasila	Terlaksananya fasilitasi Perayaan Hari Lahir Pancasila	1 kali		1 kali	-	-	1 kali	1 kali	100%
	Fasilitasi Hari Kesaktian Pancasila	Terlaksananya fasilitasi Perayaan Hari Kesaktian Pancasila	1 kali		1 kali	-	-	-	-	
	Fasilitasi Hari Sumpah Pemuda	Terlaksananya fasilitasi Perayaan Hari Sumpah Pemuda	1 kali		1 kali	-	-	-	-	

	<b>Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Transmigrasi dan Tenaga Kerja</b>									
	Peningkatan Kapasitas Dharma Wanita	Terlaksananya kegiatan peningkatan kapasitas Dharma Wanita Persatuan Provinsi NTT	12 bulan		2 kegiatan	2 kegiatan	100%	12 bulan	12 bulan	100%
	Rapat koordinasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Transmigrasi dan Tenaga Kerja	Terlaksananya Rapat koordinasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Transmigrasi dan Tenaga Kerja	2 kali		-	-	-	-	-	

	<b>Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Komunikasi, Informatika, Statistik, Persandian, dan Perhubungan</b>									
	Monitoring dan evaluasi kebijakan bidang Non Pelayanan Dasar	Terlaksananya monitoring dan evaluasi kebijakan bidang non pelayanan dasar	1 kali					-	-	
	Rapat Koordinasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Komunikasi, Informatika, Statistik, Persandian, dan Perhubungan	Terlaksananya Rapat Koordinasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Komunikasi, Informatika, Statistik, Persandian, dan Perhubungan	2 kali					-	-	

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa realisasi Renja dari target yang telah disusun terdapat beberapa kegiatan yang tidak memenuhi target dari yang telah ditetapkan, hal tersebut dikarenakan adanya efisiensi anggaran untuk penanganan Covid-19.



**Tabel 2.2**  
**Reviu terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2022**  
**Provinsi Nusa Tenggara Timur Biro Pemerintahan Setda Provinsi NTT**

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<b>Program Penunjang Urusan pemerintahan Daerah Provinsi</b>		<b>Persentase peningkatan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi</b>	<b>100%</b>	<b>278.850.800</b>	<b>Program Penunjang Urusan pemerintahan Daerah Provinsi</b>		<b>Persentase peningkatan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi</b>	<b>100%</b>	<b>278.850.800</b>	
	<b>Perencanaan, penganggaran, dan evaluasi perangkat daerah</b>		<b>Tersedianya dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja</b>	<b>5 dokumen</b>	<b>24.000.000</b>	<b>Perencanaan, penganggaran, dan evaluasi perangkat daerah</b>		<b>Tersedianya dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja</b>	<b>5 dokumen</b>	<b>24.000.000</b>	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kota Kupang	Tersedianya dokumen RKA Biro Pemerintahan Tahun 2022	1 dokumen	6.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kota Kupang	Tersedianya dokumen RKA Biro Pemerintahan Tahun 2022	1 dokumen	6.000.000	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kota Kupang	Tersedianya dokumen RKA Perubahan Biro Pemerintahan	1 dokumen	6.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kota Kupang	Tersedianya dokumen RKA Perubahan Biro Pemerintahan	1 dokumen	6.000.000	
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Tersedianya dokumen evaluasi kinerja Biro Pemerintahan	3 dokumen	9.000.000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Tersedianya dokumen evaluasi kinerja Biro Pemerintahan	3 dokumen	9.000.000	
	- Penyusunan LKPJ Biro Pemerintahan Tahun 2021		Tersedianya dokumen LKPJ Biro Pemerintahan Tahun 2021	1 dokumen	3.000.000	- Penyusunan LKPJ Biro Pemerintahan Tahun 2021		Tersedianya dokumen LKPJ Biro Pemerintahan Tahun 2021	1 dokumen	3.000.000	
	- Penyusunan LKIP Biro Pemerintahan Tahun 2021		Tersedianya dokumen LKIP Biro Pemerintahan Tahun 2021	1 dokumen	3.000.000	- Penyusunan LKIP Biro Pemerintahan Tahun 2021		Tersedianya dokumen LKIP Biro Pemerintahan Tahun 2021	1 dokumen	3.000.000	
	- Penyusunan Laporan Tahunan Biro Pemerintahan Tahun 2021		Tersedianya dokumen Biro Pemerintahan Tahun 2021	1 dokumen	3.000.000	- Penyusunan Laporan Tahunan Biro Pemerintahan Tahun 2021		Tersedianya dokumen Biro Pemerintahan Tahun 2021	1 dokumen	3.000.000	

Rencana Kerja Tahun 2022 Biro Pemerintahan Setda Provinsi NTT

	Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Kota Kupang	Tersedianya dokumen laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja Biro Pemerintahan	4 dokumen	3.000.000	Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Kota Kupang	Tersedianya dokumen laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja Biro Pemerintahan	4 dokumen	3.000.000	
	- Penyusunan laporan realisasi keuangan		Tersedianya dokumen laporan realisasi keuangan Biro Pemerintahan Tahun 2021	1 dokumen	3.000.000	- Penyusunan laporan realisasi keuangan		Tersedianya dokumen laporan realisasi keuangan Biro Pemerintahan Tahun 2021	1 dokumen	3.000.000	
	<b>Administrasi kepegawaian perangkat daerah</b>		<b>Terlaksananya administrasi kepegawaian</b>	<b>12 bulan</b>	<b>27.358.000</b>	<b>Administrasi kepegawaian perangkat daerah</b>		<b>Terlaksananya administrasi kepegawaian</b>	<b>12 bulan</b>	<b>27.358.000</b>	
	Pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi		Terlaksananya pendidikan dan pelatihan pegawai di Biro Pemerintahan	12 bulan	27.358.000	Pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi		Terlaksananya pendidikan dan pelatihan pegawai di Biro Pemerintahan	12 bulan	27.358.000	
	- Pendidikan dan pelatihan dalam daerah	Kota Kupang	Terlaksananya pendidikan dan pelatihan dalam daerah	12 bulan	6.000.000	- Pendidikan dan pelatihan dalam daerah	Kota Kupang	Terlaksananya pendidikan dan pelatihan dalam daerah	12 bulan	6.000.000	
	- Pendidikan dan pelatihan luar daerah	Jakarta	Terlaksananya pendidikan dan pelatihan luar daerah	12 bulan	21.358.000	- Pendidikan dan pelatihan luar daerah	Jakarta	Terlaksananya pendidikan dan pelatihan luar daerah	12 bulan	21.358.000	
	<b>Administrasi Umum Perangkat daerah</b>		<b>Terlaksananya kegiatan administrasi umum di Biro Pemerintahan</b>	<b>12 bulan</b>	<b>167.492.800</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat daerah</b>		<b>Terlaksananya kegiatan administrasi umum di Biro Pemerintahan</b>	<b>12 bulan</b>	<b>167.492.800</b>	
	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Kota Kupang	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	12 bulan	15.000.000	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Kota Kupang	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	12 bulan	15.000.000	
	- Fotocopy					- Fotocopy					
	- Jilid					- Jilid					
	- Cetak					- Cetak					
	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Kota Kupang	Tersedianya bahan bacaan	12 bulan	4.492.800	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Kota Kupang	Tersedianya bahan bacaan	12 bulan	4.492.800	
	Penyediaan bahan/material	Kota Kupang	Tersedianya bahan/material penunjang kegiatan di Biro Pemerintahan	12 bulan	25.000.000	Penyediaan bahan/material	Kota Kupang	Tersedianya bahan/material penunjang kegiatan di Biro Pemerintahan	12 bulan	25.000.000	
	- Alat Tulis Kantor					- Alat Tulis Kantor					
	- Alat Kebersihan					- Alat Kebersihan					

Rencana Kerja Tahun 2022 Biro Pemerintahan Setda Provinsi NTT

	Fasilitasi kunjungan tamu	Kota Kupang	Terlaksananya fasilitasi kunjungan tamu	12 bulan	15.000.000	Fasilitasi kunjungan tamu	Kota Kupang	Terlaksananya fasilitasi kunjungan tamu	12 bulan	15.000.000	
	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	22 Kabupat en/Kota	Terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi di dalam dan luar daerah	12 bulan	108.000.000	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	22 Kabupat en/Kota	Terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi di dalam dan luar daerah	12 bulan	108.000.000	
	<b>Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah</b>	Kota Kupang	<b>Terlaksananya pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah</b>	<b>6 unit</b>	<b>50.000.000</b>	<b>Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah</b>	Kota Kupang	<b>Terlaksananya pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah</b>	<b>6 unit</b>	<b>50.000.000</b>	
	<b>Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah</b>		<b>Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintahan</b>	<b>12 bulan</b>	<b>69.800.000</b>	<b>Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah</b>		<b>Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintahan</b>	<b>12 bulan</b>	<b>69.800.000</b>	
	Penyediaan jasa surat menyurat	Kota Kupang	Tersedianya jasa pengiriman surat menyurat dinas	12 bulan	15.000.000	Penyediaan jasa surat menyurat	Kota Kupang	Tersedianya jasa pengiriman surat menyurat dinas	12 bulan	15.000.000	
	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Kota Kupang	Tersedianya jasa pembayaran paket internet di Biro Pemerintahan	12 bulan	20.000.000	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Kota Kupang	Tersedianya jasa pembayaran paket internet di Biro Pemerintahan	12 bulan	20.000.000	
	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Kota Kupang	Tersedianya jasa pelayanan umum kantor	12 bulan	34.800.000	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Kota Kupang	Tersedianya jasa pelayanan umum kantor	12 bulan	34.800.000	
	<b>Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah</b>		<b>Terlaksananya pemeliharaan barang milik daerah</b>	<b>12 bulan</b>	<b>60.000.000</b>	<b>Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah</b>		<b>Terlaksananya pemeliharaan barang milik daerah</b>	<b>12 bulan</b>	<b>60.000.000</b>	
	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	Kota Kupang	Tersedianya jasa pemeliharaan kendaraan perorangan dinas dan kendaraan dinas jabatan	12 bulan	50.000.000	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	Kota Kupang	Tersedianya jasa pemeliharaan kendaraan perorangan dinas dan kendaraan dinas jabatan	12 bulan	50.000.000	
	Pemeliharaan peralatan mesin lainnya	Kota Kupang	Terlaksananya pemeliharaan peralatan mesin	12 bulan	10.000.000	Pemeliharaan peralatan mesin lainnya	Kota Kupang	Terlaksananya pemeliharaan peralatan mesin	12 bulan	10.000.000	
	<b>Program Pemerintahan dan Otonomi Daerah</b>					<b>Program Pemerintahan dan Otonomi Daerah</b>					
	<b>Program Pemerintahan dan Otonomi Daerah</b>		<b>Cakupan kegiatan tugas pemerintahan yang dilaksanakan setiap tahun</b>	<b>100%</b>	<b>490.000.000</b>	<b>Program Pemerintahan dan Otonomi Daerah</b>		<b>Cakupan kegiatan tugas pemerintahan yang</b>	<b>100%</b>	<b>490.000.000</b>	<b>0</b>

Rencana Kerja Tahun 2022 Biro Pemerintahan Setda Provinsi NTT

								dilaksanakan setiap tahun			
	<b>Kegiatan Pelaksanaan Tugas Pemerintahan</b>		<b>Jumlah tugas pemerintahan yang dilaksanakan dalam satu tahun</b>	<b>8 Kegiatan</b>	<b>490.000.000</b>	<b>Kegiatan Pelaksanaan Tugas Pemerintahan</b>		<b>Jumlah tugas pemerintahan yang dilaksanakan dalam satu tahun</b>	<b>8 Kegiatan</b>	<b>490.000.000</b>	
	<b>Pengelolaan Administrasi Kebijakan Pemerintahan</b>					<b>Pengelolaan Administrasi Kebijakan Pemerintahan</b>					
	Rapat koordinasi Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)	Kota Kupang	Terlaksananya rapat Koordinasi Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)	1 kali	23.000.000	Rapat koordinasi Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)	Kota Kupang	Terlaksananya rapat Koordinasi Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)	1 kali	23.000.000	
	Inventarisasi aset bekas milik asing di Provinsi NTT	22 Kabupat en/Kota	Tersedianya data aset bekas milik asing di Provinsi NTT	22 dokumen	80.000.000	Inventarisasi aset bekas milik asing di Provinsi NTT	22 Kabupat en/Kota	Tersedianya data aset bekas milik asing di Provinsi NTT	22 dokumen	80.000.000	
	<b>Fasilitasi Pelaksanaan Pemerintahan Umum</b>					<b>Fasilitasi Pelaksanaan Pemerintahan Umum</b>					
	Rapat koordinasi pemerintahan umum	Kota Kupang	Terlaksananya rapat koordinasi pemerintahan umum	1 kali	23.000.000	Rapat koordinasi pemerintahan umum	Kota Kupang	Terlaksananya rapat koordinasi pemerintahan umum	1 kali	23.000.000	
	Rapat koordinasi forum komunikasi pimpinan daerah (Forkopimda) Provinsi	Kota Kupang	Terlaksananya rapat koordinasi forum komunikasi pimpinan daerah (Forkopimda) Provinsi	2 kali	100.000.000	Rapat koordinasi forum komunikasi pimpinan daerah (Forkopimda) Provinsi	Kota Kupang	Terlaksananya rapat koordinasi forum komunikasi pimpinan daerah (Forkopimda) Provinsi	2 kali	100.000.000	
	Inventarisasi masalah-masalah pemerintahan umum di kabupaten/kota	22 Kabupat en/Kota	Tersedianya data inventarisasi masalah-masalah pemerintahan umum	22 dokumen	80.000.000	Inventarisasi masalah-masalah pemerintahan umum di kabupaten/kota	22 Kabupat en/Kota	Tersedianya data inventarisasi masalah-masalah pemerintahan umum	22 dokumen	80.000.000	
	<b>Fasilitasi Penataan Wilayah</b>					<b>Fasilitasi Penataan Wilayah</b>					
	Fasilitasi pemekaran kelurahan/kecamatan	22 Kabupat en/Kota	Terlaksananya fasilitasi pemekaran kecamatan/kelurahan	1 kali	80.000.000	Fasilitasi pemekaran kelurahan/kecamatan	22 Kabupat en/Kota	Terlaksananya fasilitasi pemekaran kecamatan/kelurahan	1 kali	80.000.000	

Rencana Kerja Tahun 2022 Biro Pemerintahan Setda Provinsi NTT

	Fasilitasi penyelesaian batas daerah	8 Kabuapt en	Terlaksananya fasilitasi penyelesaian batas daerah	1 kali	24.000.000	Fasilitasi penyelesaian batas daerah	8 Kabuapt en	Terlaksananya fasilitasi penyelesaian batas daerah	1 kali	24.000.000	
	Koordinasi pendataan dan verifikasi unsur rupa bumi	22 Kabupat en/Kota	Terlaksananya koordinasi pendataan dan verifikasi unsur rupa bumi	1 kali	80.000.000	Koordinasi pendataan dan verifikasi unsur rupa bumi	22 Kabupat en/Kota	Terlaksananya koordinasi pendataan dan verifikasi unsur rupa bumi	1 kali	80.000.000	
	Penyusunan Profil Kecamatan	Kota Kupang	Tersedianya dokumen Profil Kecamatan Tahun 2021	1 dokumen	6.000.000	Penyusunan Profil Kecamatan	Kota Kupang	Tersedianya dokumen Profil Kecamatan Tahun 2021	1 dokumen	6.000.000	
	<b>Program Pemerintahan dan Otonomi Daerah</b>	<b>Kota Kupang</b>	<b>Cakupan kegiatan otonomi daerah yang dilaksanakan setiap tahun</b>	<b>100%</b>	<b>636.412.155</b>	<b>Program Pemerintahan dan Otonomi Daerah</b>	<b>Kota Kupang</b>	<b>Cakupan kegiatan otonomi daerah yang dilaksanakan setiap tahun</b>	<b>100%</b>	<b>636.412.155</b>	
	<b>Kegiatan Pelaksanaan Otonomi Daerah</b>	<b>Kota Kupang</b>	<b>Jumlah tugas otonomi daerah, evaluasi, dan penyelenggaraan pemerintah yang dilaksanakan dalam satu tahun</b>	<b>10 Kegiatan</b>	<b>636.412.155</b>	<b>Kegiatan Pelaksanaan Otonomi Daerah</b>	<b>Kota Kupang</b>	<b>Jumlah tugas otonomi daerah, evaluasi, dan penyelenggaraan pemerintah yang dilaksanakan dalam satu tahun</b>	<b>10 Kegiatan</b>	<b>636.412.155</b>	
	<b>Fasilitasi Administrasi Kepala Daerah dan DPRD</b>					<b>Fasilitasi Administrasi Kepala Daerah dan DPRD</b>					
	Fasilitasi Administrasi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah pada 3 Kabupaten/Kota	Kota Kupang	Terlaksananya fasilitasi administrasi kepala daerah dan wakil kepala daerah pada 3 kabupaten/kota	1 kali	20.000.000	Fasilitasi Administrasi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah pada 3 Kabupaten/Kota	Kota Kupang	Terlaksananya fasilitasi administrasi kepala daerah dan wakil kepala daerah pada 3 kabupaten/kota	1 kali	20.000.000	
	Fasilitasi Pelantikan pejabat kepala Daerah pada 3 Kabupaten/Kota	Kota Kupang	Terlaksananya fasilitasi pelantikan pejabat kepala daerah pada 3 kabupaten/kota	1 kali	75.641.095	Fasilitasi Pelantikan pejabat kepala Daerah pada 3 Kabupaten/Kota	Kota Kupang	Terlaksananya fasilitasi pelantikan pejabat kepala daerah pada 3 kabupaten/kota	1 kali	75.641.095	
	Fasilitasi Adminsitasi Pengusulan Penggantian Antarwaktu (PAW) Anggota DPRD Provinsi NTT	Kota Kupang	Terlaksananya fasilitasi pengusulan pengganti antar waktu (PAW) anggota DPRD Provinsi NTT	10 SK	10.000.000	Fasilitasi Adminsitasi Pengusulan Penggantian Antarwaktu (PAW) Anggota DPRD Provinsi NTT	Kota Kupang	Terlaksananya fasilitasi pengusulan pengganti antar waktu (PAW) anggota DPRD Provinsi NTT	10 SK	10.000.000	

Rencana Kerja Tahun 2022 Biro Pemerintahan Setda Provinsi NTT

	Fasilitasi administrasi Penetapan Keputusan Tentang PAW Anggota DPRD Kabupaten/Kota	Kota Kupang	Terlaksananya fasilitasi administrasi penetapan keputusan tentang PAW Anggota DPRD Kabupaten/Kota	22 SK	10.000.000	Fasilitasi administrasi Penetapan Keputusan Tentang PAW Anggota DPRD Kabupaten/Kota	Kota Kupang	Terlaksananya fasilitasi administrasi penetapan keputusan tentang PAW Anggota DPRD Kabupaten/Kota	22 SK	10.000.000	
	Rapat Kerja Gubernur dengan para Bupati/Walikota se-NTT	Maumere, Sikka	Terlaksananya rapat kerja Gubernur NTT dengan para Bupati/Walikota se-NTT	1 kali	150.000.000	Rapat Kerja Gubernur dengan para Bupati/Walikota se-NTT	Maumere, Sikka	Terlaksananya rapat kerja Gubernur NTT dengan para Bupati/Walikota se-NTT	1 kali	150.000.000	
	Fasilitasi administrasi kunjungan kerja Anggota DPD RI dan DPR RI ke NTT	22 Kabupaten/Kota	Terlaksananya administrasi kunjungan kerja Pejabat Daerah dan Pejabat Politik	1 kali	80.000.000	Fasilitasi administrasi kunjungan kerja Anggota DPD RI dan DPR RI ke NTT	22 Kabupaten/Kota	Terlaksananya administrasi kunjungan kerja Pejabat Daerah dan Pejabat Politik	1 kali	80.000.000	
	Fasilitasi administrasi usulan ijin luar negeri Kepala Daerah dan Anggota DPRD Provinsi	Kota Kupang dan Jakarta	Terlaksananya administrasi usulan ijin luar negeri Kepala daerah dan Anggota DPRD	2 kali	20.000.000	Fasilitasi administrasi usulan ijin luar negeri Kepala Daerah dan Anggota DPRD Provinsi	Kota Kupang dan Jakarta	Terlaksananya administrasi usulan ijin luar negeri Kepala daerah dan Anggota DPRD	2 kali	20.000.000	
	<b>Evaluasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan</b>				20.000.000	<b>Evaluasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan</b>				20.000.000	
	Penyusunan LKPJ Tahun 2021	Kota Kupang	Tersedianya dokumen LKPJ Tahun 2021	1 dokumen	80.000.000	Penyusunan LKPJ Tahun 2021	Kota Kupang	Tersedianya dokumen LKPJ Tahun 2021	1 dokumen	80.000.000	
	Penyusunan LPPD Tahun 2021	Kota Kupang	Tersedianya dokumen LPPD Tahun 2021	1 dokumen	80.000.000	Penyusunan LPPD Tahun 2021	Kota Kupang	Tersedianya dokumen LPPD Tahun 2021	1 dokumen	80.000.000	
	Penyusunan SPM Tahun 2021	Kota Kupang	Tersedianya dokumen SPM Tahun 2021	1 dokumen	5.000.000	Penyusunan SPM Tahun 2021	Kota Kupang	Tersedianya dokumen SPM Tahun 2021	1 dokumen	5.000.000	
	Penyusunan Self Assessment LPPD Tahun 2021	Kota Kupang	Terlaksananya Self Assessment LPPD Tahun 2021	1 kali	20.000.000	Penyusunan Self Assessment LPPD Tahun 2021	Kota Kupang	Terlaksananya Self Assessment LPPD Tahun 2021	1 kali	20.000.000	
	Penyusunan RLPPD dan Nota Pengantar LKPJ Tahun 2021	Kota Kupang	Terlaksananya penyusunan RLPPD dan Nota Pengantar LKPJ Tahun 2021	1 kali	65.771.060	Penyusunan RLPPD dan Nota Pengantar LKPJ Tahun 2021	Kota Kupang	Terlaksananya penyusunan RLPPD dan Nota Pengantar LKPJ Tahun 2021	1 kali	65.771.060	

Rencana Kerja Tahun 2022 Biro Pemerintahan Setda Provinsi NTT

	<b>Program Pemerintahan dan Otonomi Daerah</b>	<b>Kota Kupang</b>	<b>3. Cakupan kegiatan penataan urusan yang dilaksanakan setiap tahun</b>	<b>100%</b>	<b>300.000.000</b>	<b>Program Pemerintahan dan Otonomi Daerah</b>	<b>Kota Kupang</b>	<b>3. Cakupan kegiatan penataan urusan yang dilaksanakan setiap tahun</b>	<b>100%</b>	<b>300.000.000</b>	
	<b>Kegiatan Pelaksanaan Otonomi Daerah</b>	<b>Kota Kupang</b>	<b>Jumlah tugas penataan urusan yang dilaksanakan dalam satu tahun</b>	<b>10 kegiatan</b>	<b>300.000.000</b>	<b>Kegiatan Pelaksanaan Otonomi Daerah</b>	<b>Kota Kupang</b>	<b>Jumlah tugas penataan urusan yang dilaksanakan dalam satu tahun</b>	<b>10 kegiatan</b>	<b>300.000.000</b>	
	<b>Pengembangan Otonomi dan Penataan Urusan</b>					<b>Pengembangan Otonomi dan Penataan Urusan</b>					
	Rapat koordinasi kebijakan pengembangan otonomi daerah	Kota Kupang	Terlaksananya rapat koordinasi kebijakan pengembangan otonomi daerah	1 kali	100.000.000	Rapat koordinasi kebijakan pengembangan otonomi daerah	Kota Kupang	Terlaksananya rapat koordinasi kebijakan pengembangan otonomi daerah	1 kali	100.000.000	
	Inventarisasi pemetaan urusan pemerintah provinsi dan kabupaten/kota	22 kabupaten/kota	Tersedianya data inventarisasi pemetaan urusan pemerintah provinsi dan kabupaten/kota	2 kali	80.000.000	Inventarisasi pemetaan urusan pemerintah provinsi dan kabupaten/kota	22 kabupaten/kota	Tersedianya data inventarisasi pemetaan urusan pemerintah provinsi dan kabupaten/kota	2 kali	80.000.000	
	Fasilitasi dan koordinasi penyelenggaraan peringatan hari jadi provinsi NTT	Kota Kupang	Terlaksananya fasilitasi dan koordinasi penyelenggaraan peringatan hari jadi Provinsi NTT	1 kali	120.000.000	Fasilitasi dan koordinasi penyelenggaraan peringatan hari jadi provinsi NTT	Kota Kupang	Terlaksananya fasilitasi dan koordinasi penyelenggaraan peringatan hari jadi Provinsi NTT	1 kali	120.000.000	
	<b>Program Pemerintahan dan Otonomi Daerah</b>	<b>Kota Kupang</b>	<b>Cakupan kerja sama daerah yang difasilitasi setiap tahun</b>	<b>100%</b>	<b>803.130.000</b>	<b>Program Pemerintahan dan Otonomi Daerah</b>	<b>Kota Kupang</b>	<b>Cakupan kerja sama daerah yang difasilitasi setiap tahun</b>	<b>100%</b>	<b>803.130.000</b>	
	<b>Kegiatan Fasilitasi Kerjasama Daerah</b>	<b>Kota Kupang</b>	<b>Jumlah fasilitasi kerja sama yang dilaksanakan dalam satu tahun</b>	<b>16 kegiatan</b>	<b>803.130.000</b>	<b>Kegiatan Fasilitasi Kerjasama Daerah</b>	<b>Kota Kupang</b>	<b>Jumlah fasilitasi kerja sama yang dilaksanakan dalam satu tahun</b>	<b>16 kegiatan</b>	<b>803.130.000</b>	
	<b>Fasilitasi Kerjasama antar Pemerintah</b>					<b>Fasilitasi Kerjasama antar Pemerintah</b>					
	Rapat koordinasi kebijakan kerja sama antar pemerintah luar negeri	Kota Kupang	Terlaksananya kegiatan rapat koordinasi kebijakan kerja sama antar pemerintah luar negeri	4 kali	60.000.000	Rapat koordinasi kebijakan kerja sama antar pemerintah luar negeri	Kota Kupang	Terlaksananya kegiatan rapat koordinasi kebijakan kerja sama antar pemerintah luar negeri	4 kali	60.000.000	

Rencana Kerja Tahun 2022 Biro Pemerintahan Setda Provinsi NTT

	Rapat koordinasi kebijakan kerja sama antar pemerintah dalam negeri	Kota Kupang	Terlaksananya kegiatan rapat koordinasi kebijakan kerja sama antar pemerintah dalam negeri	4 kali	60.000.000	Rapat koordinasi kebijakan kerja sama antar pemerintah dalam negeri	Kota Kupang	Terlaksananya kegiatan rapat koordinasi kebijakan kerja sama antar pemerintah dalam negeri	4 kali	60.000.000	
	Monitoring dan evaluasi lembaga mitra internasional dan pembinaan kerja sama di kabupaten/kota	22 Kabupaten/Kota	Terlaksananya monitoring dan evaluasi lembaga mitra internasional dan pembinaan kerja sama di kabupaten/kota	1 kali	69.000.000	Monitoring dan evaluasi lembaga mitra internasional dan pembinaan kerja sama di kabupaten/kota	22 Kabupaten/Kota	Terlaksananya monitoring dan evaluasi lembaga mitra internasional dan pembinaan kerja sama di kabupaten/kota	1 kali	69.000.000	
	Penyusunan buku profil lembaga mitra internasional/NGO	Kota Kupang	Tersedianya buku profil lembaga mitra internasional/NGO	1 Dokumen	1.000.000	Penyusunan buku profil lembaga mitra internasional/NGO	Kota Kupang	Tersedianya buku profil lembaga mitra internasional/NGO	1 Dokumen	1.000.000	
	Monitoring dan evaluasi program Inovasi	Kabupaten Nagekeo, Sumba Barat, Sumba Barat Daya, Sumba Tengah, Sumba Timur	Terlaksananya monitoring dan evaluasi program inovasi	1 kali	24.530.000	Monitoring dan evaluasi program Inovasi	Kabupaten Nagekeo, Sumba Barat, Sumba Barat Daya, Sumba Tengah, Sumba Timur	Terlaksananya monitoring dan evaluasi program inovasi	1 kali	24.530.000	
	Rapat Tim Working Group Peace Corps Tk. Provinsi NTT	Kota Kupang	Terlaksananya Rapat Tim Working Group Peace Corps Tk. Provinsi NTT	2 kali	20.000.000	Rapat Tim Working Group Peace Corps Tk. Provinsi NTT	Kota Kupang	Terlaksananya Rapat Tim Working Group Peace Corps Tk. Provinsi NTT	2 kali	20.000.000	
	Mendampingi Gubernur/Wakil Gubernur dalam rangka kunjungan kerja ke luar negeri	Luar Negeri	Terlaksananya pendampingan kunjungan kerja Gubernur/Wakil Gubernur ke luar negeri	2 kali	150.000.000	Mendampingi Gubernur/Wakil Gubernur dalam rangka kunjungan kerja ke luar negeri	Luar Negeri	Terlaksananya pendampingan kunjungan kerja Gubernur/Wakil Gubernur ke luar negeri	2 kali	150.000.000	
	<b>Fasilitasi Kerjasama Badan Usaha/Swasta</b>					<b>Fasilitasi Kerjasama Badan Usaha/Swasta</b>					
	Sosialisasi kebijakan kerja sama di kabupaten/kota	22 kabupaten/kota	Terlaksananya sosialisasi kebijakan kerja sama di kabupaten/kota	1 kali	80.000.000	Sosialisasi kebijakan kerja sama di kabupaten/kota	22 kabupaten/kota	Terlaksananya sosialisasi kebijakan kerja sama di kabupaten/kota	1 kali	80.000.000	
	Rapat koordinasi kerja sama badan usaha/swasta	Kota Kupang	Terlaksananya rapat koordinasi kerja sama badan usaha/swasta	3 kali	45.000.000	Rapat koordinasi kerja sama badan usaha/swasta	Kota Kupang	Terlaksananya rapat koordinasi kerja sama badan usaha/swasta	3 kali	45.000.000	



Rencana Kerja Tahun 2022 Biro Pemerintahan Setda Provinsi NTT

	Koordinasi dan peninjauan kerja sama badan usaha/swasta	Surabaya dan Jakarta	Terlaksananya koordinasi dan peninjauan kerja sama badan usaha/swasta	1 kali	30.000.000	Koordinasi dan peninjauan kerja sama badan usaha/swasta	Surabaya dan Jakarta	Terlaksananya koordinasi dan peninjauan kerja sama badan usaha/swasta	1 kali	30.000.000	
	<b>Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama</b>					<b>Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama</b>					
	Honor Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah	Kota Kupang	Tersedianya honor Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah	12 Bulan	183.600.000	Honor Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah	Kota Kupang	Tersedianya honor Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah	12 Bulan	183.600.000	
	Pengambilan data potensi daerah untuk data kerja sama	22 Kabupaten/kota	Tersedianya data potensi daerah untuk kerja sama	1 kali	80.000.000	Pengambilan data potensi daerah untuk data kerja sama	22 Kabupaten/kota	Tersedianya data potensi daerah untuk kerja sama	1 kali	80.000.000	
	<b>Program Kesejahteraan Rakyat</b>	<b>Kota Kupang</b>	<b>Persentase peningkatan pelayanan kesejahteraan rakyat (kegiatan di bidang kesejahteraan rakyat yang dilaksanakan)</b>	<b>100%</b>	<b>6.186.381.654</b>	<b>Program Kesejahteraan Rakyat</b>	<b>Kota Kupang</b>	<b>Persentase peningkatan pelayanan kesejahteraan rakyat (kegiatan di bidang kesejahteraan rakyat yang dilaksanakan)</b>	<b>100%</b>	<b>6.186.381.654</b>	
	<b>Kegiatan Fasilitasi Pembinaan Mental Spiritual</b>	<b>Kota Kupang</b>	<b>Jumlah fasilitasi kegiatan keagamaan yang dilaksanakan dalam satu tahun</b>	<b>18 kegiatan</b>	<b>3.420.690.827</b>	<b>Kegiatan Fasilitasi Pembinaan Mental Spiritual</b>	<b>Kota Kupang</b>	<b>Jumlah fasilitasi kegiatan keagamaan yang dilaksanakan dalam satu tahun</b>	<b>18 kegiatan</b>	<b>3.420.690.827</b>	
	<b>Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual</b>					<b>Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual</b>					
	Fasilitasi pelaksanaan MTQ Tingkat Provinsi	Lembata	Terlaksananya kegiatan MTQ Tingkat Provinsi NTT	1 kali kegiatan	316.000.000	Fasilitasi pelaksanaan MTQ Tingkat Provinsi	Lembata	Terlaksananya kegiatan MTQ Tingkat Provinsi NTT	1 kali kegiatan	316.000.000	
	Fasilitasi pelaksanaan MTQ Tingkat Nasional	Banjarmasin	Terlaksananya kegiatan MTQ Tingkat Nasional	1 kali kegiatan	394.293.227	Fasilitasi pelaksanaan MTQ Tingkat Nasional	Banjarmasin	Terlaksananya kegiatan MTQ Tingkat Nasional	1 kali kegiatan	394.293.227	
	Workshop Utsawa Dharma Gita (UDG)	Kupang	Terlaksananya kegiatan workshop Utsawa Dharma Gita (UDG)	1 kali kegiatan	70.000.000	Workshop Utsawa Dharma Gita (UDG)	Kupang	Terlaksananya kegiatan workshop Utsawa Dharma Gita (UDG)	1 kali kegiatan	70.000.000	
	Buka Puasa Bersama	Kota Kupang	Terlaksananya kegiatan buka puasa bersama	300 orang	37.000.000	Buka Puasa Bersama	Kota Kupang	Terlaksananya kegiatan buka puasa bersama	300 orang	37.000.000	
	Halal Bi Halal	Kota Kupang	Terlaksananya kegiatan Halal Bihalal	500 orang	28.000.000	Halal Bi Halal	Kota Kupang	Terlaksananya kegiatan Halal Bihalal	500 orang	28.000.000	

Rencana Kerja Tahun 2022 Biro Pemerintahan Setda Provinsi NTT

	Fasilitasi pelaksanaan kurban dalam rangka Hari Raya Idul Adha	Kota Kupang	Terlaksananya fasilitasi pelaksanaan kurban dalam rangka perayaan Hari Raya Idul Adha	22 kabupaten /kota	695.000.000	Fasilitasi pelaksanaan kurban dalam rangka Hari Raya Idul Adha	Kota Kupang	Terlaksananya fasilitasi pelaksanaan kurban dalam rangka perayaan Hari Raya Idul Adha	22 kabupaten /kota	695.000.000	
	Penyelenggaraan Urusan Haji	Kota Kupang	Tersedianya bantuan Ongkos Naik Haji untuk ASN Lingkup Pemerintah Provinsi NTT	1 orang	113.404.000	Penyelenggaraan Urusan Haji	Kota Kupang	Tersedianya bantuan Ongkos Naik Haji untuk ASN Lingkup Pemerintah Provinsi NTT	1 orang	113.404.000	
		Surabaya	Terlaksananya fasilitasi pelepasan dan penjemputan jamaah haji asal Provinsi NTT di Surabaya	5 orang/kegiatan			Surabaya	Terlaksananya fasilitasi pelepasan dan penjemputan jamaah haji asal Provinsi NTT di Surabaya	5 orang/kegiatan		
	Pekan Suci (Samana Santa) Lantuka	Larantuka, Flores Timur	Terlaksananya fasilitasi penyediaan tiket bagi umat Katolik dalam rangka pelaksanaan Pekan Suci Samana Santa	500 orang	221.901.800	Pekan Suci (Samana Santa) Lantuka	Larantuka, Flores Timur	Terlaksananya fasilitasi penyediaan tiket bagi umat Katolik dalam rangka pelaksanaan Pekan Suci Samana Santa	500 orang	221.901.800	
	Natal Oikumene Lingkup Pemerintah Provinsi NTT	Kota Kupang	Terlaksananya perayaan Natal Oikumene	1000 orang	84.091.800	Natal Oikumene Lingkup Pemerintah Provinsi NTT	Kota Kupang	Terlaksananya perayaan Natal Oikumene	1000 orang	84.091.800	
	Fasilitasi Pesparawi Tingkat Nasional	Yogyakarta	Terlaksananya fasilitasi Pesparawi Tingkat Nasional	1 kali kegiatan	350.000.000	Fasilitasi Pesparawi Tingkat Nasional	Yogyakarta	Terlaksananya fasilitasi Pesparawi Tingkat Nasional	1 kali kegiatan	350.000.000	
	Fasilitasi Pesparani Tingkat Provinsi	Kota Kupang	Terlaksananya fasilitasi Pesparani Tingkat Provinsi NTT	1 kali kegiatan	200.000.000	Fasilitasi Pesparani Tingkat Provinsi	Kota Kupang	Terlaksananya fasilitasi Pesparani Tingkat Provinsi NTT	1 kali kegiatan	200.000.000	
	Fasilitasi Peparani Tingkat Nasional	Kota Kupang	Terlaksananya fasilitasi Peparani Tingkat Nasional	1 kali kegiatan	350.000.000	Fasilitasi Peparani Tingkat Nasional	Kota Kupang	Terlaksananya fasilitasi Peparani Tingkat Nasional	1 kali kegiatan	350.000.000	
	Hari Raya Waisak	Kota Kupang	Terlaksananya perayaan Hari Raya Waisak	200 orang	28.000.000	Hari Raya Waisak	Kota Kupang	Terlaksananya perayaan Hari Raya Waisak	200 orang	28.000.000	
	Hari Raya Nyepi	Kota Kupang	Terlaksananya perayaan Hari Raya Nyepi	200 orang	28.000.000	Hari Raya Nyepi	Kota Kupang	Terlaksananya perayaan Hari Raya Nyepi	200 orang	28.000.000	

Rencana Kerja Tahun 2022 Biro Pemerintahan Setda Provinsi NTT

	Dialog Pemerintah Provinsi NTT dengan Lembaga Keagamaan	Kota kupang	Terlaksananya dialog Pemerintah Provinsi NTT dengan Pimpinan Lembaga Keagamaan	120 orang	105.000.000	Dialog Pemerintah Provinsi NTT dengan Lembaga Keagamaan	Kota kupang	Terlaksananya dialog Pemerintah Provinsi NTT dengan Pimpinan Lembaga Keagamaan	120 orang	105.000.000	
	Temu Pemuda Lintas Agama Se-daratan Flores	Bajawa	Terlaksananya kegiatan Temu Pemuda Lintas Agama se daratan Flores	120 orang	200.000.000	Temu Pemuda Lintas Agama Se-daratan Flores	Bajawa	Terlaksananya kegiatan Temu Pemuda Lintas Agama se daratan Flores	120 orang	200.000.000	
	Dialog kerukunan Lintas Agama Se-daratan Sumba	Tambola ka	Terlaksananya kegiatan Dialog Kerukunan Lintas Agama se daratan Sumba	120 orang	200.000.000	Dialog kerukunan Lintas Agama Se-daratan Sumba	Tambola ka	Terlaksananya kegiatan Dialog Kerukunan Lintas Agama se daratan Sumba	120 orang	200.000.000	
	<b>Kegiatan Fasilitas Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar</b>	<b>Kota Kupang</b>	<b>Jumlah fasilitas, koordinasi, sinkronisasi, dan evaluasi kegiatan bidang pelayanan dasar</b>	<b>14 kegiatan</b>	<b>2.269.690.827</b>	<b>Kegiatan Fasilitas Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar</b>	<b>Kota Kupang</b>	<b>Jumlah fasilitas, koordinasi, sinkronisasi, dan evaluasi kegiatan bidang pelayanan dasar</b>	<b>14 kegiatan</b>	<b>2.269.690.827</b>	
	<b>Fasilitas Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi, dan Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pendidikan</b>				<b>2.679.690.827</b>	<b>Fasilitas Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi, dan Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pendidikan</b>	<b>#VALUE!</b>			<b>2.679.690.827</b>	
	Studi Kelayakan dan Operasional Sekolah Tinggi Pariwisata	Sumba Tengah	Tersedianya data hasil studi kelayakan dan operasional Sekolah Tinggi Pariwisata	4 kabupaten	300.000.000	Studi Kelayakan dan Operasional Sekolah Tinggi Pariwisata	Sumba Tengah	Tersedianya data hasil studi kelayakan dan operasional Sekolah Tinggi Pariwisata	4 kabupaten	300.000.000	
	Koordinasi dan Fasilitas Dokumen Study Kelayakan Sekolah Tinggi Pariwisata	Jakarta	Terlaksananya fasilitas dokumen hasil studi kelayakan Sekolah Tinggi Pariwisata	2 kali	50.000.000	Koordinasi dan Fasilitas Dokumen Study Kelayakan Sekolah Tinggi Pariwisata	Jakarta	Terlaksananya fasilitas dokumen hasil studi kelayakan Sekolah Tinggi Pariwisata	2 kali	50.000.000	
	Verifikasi Proposal Bantuan Sosial Beasiswa dan Bantuan Penelitian	Kota Kupang	Tersedianya data hasil verifikasi bantuan sosial beasiswa dan bantuan penelitian	12 bulan	120.000.000	Verifikasi Proposal Bantuan Sosial Beasiswa dan Bantuan Penelitian	Kota Kupang	Tersedianya data hasil verifikasi bantuan sosial beasiswa dan bantuan penelitian	12 bulan	120.000.000	
	Rakor Perguruan Tinggi Negeri dan Swasta se NTT	Kota Kupang	Terlaksananya rakor perguruan tinggi negeri dan swasta se NTT	67 Perguruan Tinggi	228.000.000	Rakor Perguruan Tinggi Negeri dan Swasta se NTT	Kota Kupang	Terlaksananya rakor perguruan tinggi negeri dan swasta se NTT	67 Perguruan Tinggi	228.000.000	

Rencana Kerja Tahun 2022 Biro Pemerintahan Setda Provinsi NTT

	Monitoring dan evaluasi pelaksanaan koordinasi kebijakan bidang pendidikan di kabupaten/kota	22 Kabupat en/kota	Terlaksananya kegiatan monitoring dan evaluasi koordinasi kebijakan bidang pendidikan di kabupaten/kota	1 kali	97.000.000	Monitoring dan evaluasi pelaksanaan koordinasi kebijakan bidang pendidikan di kabupaten/kota	22 Kabupat en/kota	Terlaksananya kegiatan monitoring dan evaluasi koordinasi kebijakan bidang pendidikan di kabupaten/kota	1 kali	97.000.000	
	<b>Fasilitasi Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi, dan Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kesehatan</b>					<b>Fasilitasi Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi, dan Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kesehatan</b>					
	Advokasi Tim Pembina UKS di Kabupaten/Kota se Provinsi NTT	22 Kabupat en/Kota dan Jakarta	Terlaksananya advokasi Tim Pembina UKS di Kabupaten/Kota se NTT	1 kali	195.000.000	Advokasi Tim Pembina UKS di Kabupaten/Kota se Provinsi NTT	22 Kabupat en/Kota dan Jakarta	Terlaksananya advokasi Tim Pembina UKS di Kabupaten/Kota se NTT	1 kali	195.000.000	
	Rapat Koordinasi Penanganan Masalah-masalah Kesehatan	Kota Kupang	Terlaksananya koordinasi penanganan masalah-masalah kesehatan	2 kali	46.000.000	Rapat Koordinasi Penanganan Masalah-masalah Kesehatan	Kota Kupang	Terlaksananya koordinasi penanganan masalah-masalah kesehatan	2 kali	46.000.000	
	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	Kota Kupang	Tersedianya honor tim pelaksana kegiatan dan honor sekretariat Tim pelaksana kegiatan	12 bulan	564.448.000	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	Kota Kupang	Tersedianya honor tim pelaksana kegiatan dan honor sekretariat Tim pelaksana kegiatan	12 bulan	564.448.000	
	Honorarium Tim Ahli Independen Penanganan Covid-19	Kota Kupang	Terlaksananya honor bagi Tim Ahli Independen Penanganan Covid-19	12 bulan	50.000.000	Honorarium Tim Ahli Independen Penanganan Covid-19	Kota Kupang	Terlaksananya honor bagi Tim Ahli Independen Penanganan Covid-19	12 bulan	50.000.000	
	Rapat koordinasi dan evaluasi penanganan Covid-19 di Provinsi NTT	Kota Kupang	Terlaksananya rapat koordinasi dan evaluasi penanganan Covid-19 di Provinsi NTT	12 kali	200.000.000	Rapat koordinasi dan evaluasi penanganan Covid-19 di Provinsi NTT	Kota Kupang	Terlaksananya rapat koordinasi dan evaluasi penanganan Covid-19 di Provinsi NTT	12 kali	200.000.000	
	Operasional Tim pelaksana kegiatan dan sekretariat tim pelaksana kegiatan	Kota Kupang	Tersedianya operasional tim pelaksana kegiatan dan sekretariat tim pelaksana kegiatan	12 bulan	179.242.827	Operasional Tim pelaksana kegiatan dan sekretariat tim pelaksana kegiatan	Kota Kupang	Tersedianya operasional tim pelaksana kegiatan dan sekretariat tim pelaksana kegiatan	12 bulan	179.242.827	
	Monitoring dan evaluasi pelaksanaan koordinasi kebijakan bidang kesehatan di kabupaten/kota	22 Kabupat en/kota	Terlaksananya kegiatan monitoring dan evaluasi koordinasi kebijakan bidang kesehatan di kabupaten/kota	1 kali	97.000.000	Monitoring dan evaluasi pelaksanaan koordinasi kebijakan bidang kesehatan di kabupaten/kota	22 Kabupat en/kota	Terlaksananya kegiatan monitoring dan evaluasi koordinasi kebijakan bidang kesehatan di kabupaten/kota	1 kali	97.000.000	

Rencana Kerja Tahun 2022 Biro Pemerintahan Setda Provinsi NTT

						kesehatan di kabupaten/kota		kesehatan di kabupaten/kota			
	<b>Fasilitasi Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi, dan Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Sosial</b>					<b>Fasilitasi Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi, dan Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Sosial</b>					
	Rapat Koordinasi Penanganan Masalah-masalah Sosial	Kota Kupang	Terlaksananya rapat koodinasi penanganan masalah-masalah sosial	2 kali	46.000.000	Rapat Koordinasi Penanganan Masalah-masalah Sosial	Kota Kupang	Terlaksananya rapat koodinasi penanganan masalah-masalah sosial	2 kali	46.000.000	
	Monitoring dan evaluasi pelaksanaan koordinasi kebijakan bidang sosial di kabupaten/kota	22 Kabupat en/kota	Terlaksananya kegiatan monitoring dan evaluasi koordinasi kebijakan bidang sosial di kabupaten/kota	1 kali	97.000.000	Monitoring dan evaluasi pelaksanaan koordinasi kebijakan bidang sosial di kabupaten/kota	22 Kabupat en/kota	Terlaksananya kegiatan monitoring dan evaluasi koordinasi kebijakan bidang sosial di kabupaten/kota	1 kali	97.000.000	
	<b>Kegiatan Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Non Dasar</b>	<b>Kota Kupang</b>	<b>Jumlah fasilitasi, koordinasi, sinkronisasi, dan evaluasi kegiatan bidang non pelayanan dasar</b>	<b>9 kegiatan</b>	<b>496.000.000</b>	<b>Kegiatan Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Non Dasar</b>	<b>Kota Kupang</b>	<b>Jumlah fasilitasi, koordinasi, sinkronisasi, dan evaluasi kegiatan bidang non pelayanan dasar</b>	<b>9 kegiatan</b>	<b>496.000.000</b>	
	<b>Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kepemudaan, Olah Raga, Kebudayaan, dan Pariwisata</b>					<b>Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kepemudaan, Olah Raga, Kebudayaan, dan Pariwisata</b>					
	Rapat koordinasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata	Kota Kupang	Terlaksananya rapat koordinasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata	2 kali	46.000.000	Rapat koordinasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata	Kota Kupang	Terlaksananya rapat koordinasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata	2 kali	46.000.000	
	Fasilitasi HUT Proklamasi RI	Kota Kupang	Terlaksananya fasilitasi Perayaan HUT Proklamasi RI	1 kali	79.000.000	Fasilitasi HUT Proklamasi RI	Kota Kupang	Terlaksananya fasilitasi Perayaan HUT Proklamasi RI	1 kali	79.000.000	

Rencana Kerja Tahun 2022 Biro Pemerintahan Setda Provinsi NTT

	Fasilitasi Hari Lahir Pancasila	Kota Kupang	Terlaksananya fasilitasi Perayaan Hari Lahir Pancasila	1 kali	25.000.000	Fasilitasi Hari Lahir Pancasila	Kota Kupang	Terlaksananya fasilitasi Perayaan Hari Lahir Pancasila	1 kali	25.000.000	
	Fasilitasi Hari Kesaktian Pancasila	Kota Kupang	Terlaksananya fasilitasi Perayaan Hari Kesaktian Pancasila	1 kali	25.000.000	Fasilitasi Hari Kesaktian Pancasila	Kota Kupang	Terlaksananya fasilitasi Perayaan Hari Kesaktian Pancasila	1 kali	25.000.000	
	Fasilitasi Hari Sumpah Pemuda	Kota Kupang	Terlaksananya fasilitasi Perayaan Hari Sumpah Pemuda	1 kali	25.000.000	Fasilitasi Hari Sumpah Pemuda	Kota Kupang	Terlaksananya fasilitasi Perayaan Hari Sumpah Pemuda	1 kali	25.000.000	
	<b>Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Transmigrasi dan Tenaga Kerja</b>					<b>Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Transmigrasi dan Tenaga Kerja</b>					
	Peningkatan Kapasitas Dharma Wanita	Kota Kupang	Terlaksananya kegiatan peningkatan kapasitas Dharma Wanita Persatuan Provinsi NTT	12 bulan	154.000.000	Peningkatan Kapasitas Dharma Wanita	Kota Kupang	Terlaksananya kegiatan peningkatan kapasitas Dharma Wanita Persatuan Provinsi NTT	12 bulan	154.000.000	

Rencana Kerja Tahun 2022 Biro Pemerintahan Setda Provinsi NTT

	Rapat koordinasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Transmigrasi dan Tenaga Kerja	Kota Kupang	Terlaksananya Rapat koordinasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Transmigrasi dan Tenaga Kerja	2 kali	46.000.000	Rapat koordinasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Transmigrasi dan Tenaga Kerja	Kota Kupang	Terlaksananya Rapat koordinasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Transmigrasi dan Tenaga Kerja	2 kali	46.000.000	
	<b>Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Komunikasi, Informatika, Statistik, Persandian, dan Perhubungan</b>					<b>Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Komunikasi, Informatika, Statistik, Persandian, dan Perhubungan</b>					
	Monitoring dan evaluasi kebijakan bidang Non Pelayanan Dasar	22 kabupaten/kota	Terlaksananya monitoring dan evaluasi kebijakan bidang non pelayanan dasar	1 kali	96.000.000	Monitoring dan evaluasi kebijakan bidang Non Pelayanan Dasar	22 kabupaten/kota	Terlaksananya monitoring dan evaluasi kebijakan bidang non pelayanan dasar	1 kali	96.000.000	
	Rapat Koordinasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Komunikasi, Informatika, Statistik, Persandian, dan Perhubungan	Kota Kupang	Terlaksananya Rapat Koordinasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Komunikasi, Informatika, Statistik, Persandian, dan Perhubungan	2 kali	46.000.000	Rapat Koordinasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Komunikasi, Informatika, Statistik, Persandian, dan Perhubungan	Kota Kupang	Terlaksananya Rapat Koordinasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Komunikasi, Informatika, Statistik, Persandian, dan Perhubungan	2 kali	46.000.000	







## **BAB III**

## **TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH**

### **3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional**

RKPD Tahun 2023 merupakan dokumen perencanaan tahun keempat dari RPJMN 2020-2024 dan sebagai tahapan tahun kelima RPJMD 2018 – 2023, penyusunan RKPD tahun 2023 dilaksanakan dengan mengakomodir upaya penyelarasan materi awal RPJMD 2018-2023 dengan menyesuaikan konten RKPD tahun 2023. Penyelarasan ini dilakukan dengan memperhatikan hasil evaluasi pelaksanaan RKPD Tahun 2022 dan kondisi pandemi Covid-19. Penyelarasan perencanaan pembangunan daerah dan nasional dilaksanakan dengan menggunakan prinsip *money follows program*. Pendekatan tersebut mengutamakan pembagian sumber daya (anggaran) berdasarkan program dan kegiatan prioritas dalam rangka mencapai tujuan pembangunan nasional.

Biro Pemerintahan Setda Provinsi NTT melakukan telaahan terhadap Renstra Kementerian Dalam Negeri Tahun 2020-2024 untuk menselaraskan, mensinkronisasikan, dan mensinergikan pencapaian sasaran pelaksanaan program dan kegiatan dalam Renstra Biro Pemerintahan Setda Provinsi NTT Tahun 2018-2023. Renstra Kementerian Dalam Negeri memuat 10 (sepuluh) poin di antaranya :

1. Menciptakan SDM yang unggul;

2. Melanjutkan pembangunan infrastruktur dalam rangka untuk mendorong pembangunan ekonomi;
3. Membuka keterisolasian serta konektivitas;
4. Menyederhanakan regulasi;
5. Reformasi birokrasi;
6. Pembinaan stabilitas politik dalam negeri;
7. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah dan desa;
8. Memanfaatkan data kependudukan nasional untuk pelayanan publik;
9. Pelayanan publik dan kemudahan berusaha dan investasi daerah;
10. Penataan wilayah dan pembangunan daerah.

Pada Renstra Tahun 2018-2023, Biro Pemerintahan perlu menetapkan sasaran strategis untuk mendukung sasaran strategis Kementerian dalam Negeri khususnya pada poin (7) yaitu “Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah dan desa” dan poin (10) yaitu “Penataan wilayah dan pembangunan daerah”.

Sedangkan untuk indikator kesejahteraan rakyat pada Biro Pemerintahan melakukan telaahan terhadap Renstra Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia, dimana terdapat dua sasaran strategis yaitu:

1. Meningkatnya implementasi kebijakan pembangunan manusia dan kebudayaan yang maju dan berkelanjutan;

2. Meningkatnya kualitas koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan.

Oleh karena itu di dalam Renstra Biro Pemerintahan perlu menetapkan sasaran strategis untuk mendukung sasaran Kementerian PMK RI.

Dalam rangka mendukung sasaran strategis tersebut, Biro Pemerintahan harus menyelenggarakan kegiatan pemerintahan dan kesejahteraan rakyat secara baik melalui langkah strategis. Gambaran Pelayanan Biro Pemerintahan :

- a. Menggunakan aturan yang ada secara baik dan benar, termasuk implementasi kebijakan pemerintahan, otonomi daerah, kerja sama, dan kesejahteraan rakyat sebagai prakondisi bagi *good governance*;
- b. Mendukung pemimpin dan kepemimpinan yang ada melalui dedikasi bawahan/staf agar tetap terpeliharanya atau sebagai jaminan untuk memperoleh dukungan politik DPRD dalam pelaksanaan fungsi dan tugas pokok biro;
- c. Pemberdayaan SDM yang tersedia;
- d. Menumbuhkembangkan dedikasi bawahan/staf kepada pemimpin dan kepemimpinan serta efisiensi penggunaan dana demi eksistensi biro;
- e. Pemberian penghargaan dan sanksi secara proporsional;
- f. Meningkatkan efisiensi prasarana dan sarana pendukung yang ada;

Penataan kewenangan berdasarkan aturan yang ada dan proaktif untuk solusi terhadap masih adanya ketidakjelasan arah dan tujuan kebijakan pusat.

### **3.2. Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah**

Berdasarkan visi dan misi Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018-2023 serta tujuan dan sasaran jangka menengah dalam RPJMD Tahun 2018-2023, maka selanjutnya Biro Pemerintahan Setda Provinsi NTT menetapkan tujuan dan sasaran pembangunan perangkat daerah selama lima tahun. Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam menyusun strategi pembangunan.

Tujuan merupakan pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi dan misi dengan menjawab isu strategis daerah dan permasalahan pembangunan daerah. Tujuan diturunkan secara lebih operasional dari misi pembangunan dengan memperhatikan visi. Untuk mewujudkan suatu misi, dapat dicapai melalui beberapa tujuan. Rumusan tujuan Biro Pemerintahan Setda Provinsi NTT dalam rangka mencapai visi dan misi pembangunan di Nusa Tenggara Timur.

Sedangkan sasaran adalah penjabaran dari tujuan yang merupakan hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara spesifik, terukur, dan rasional. Sasaran harus mempunyai indikator yang terukur dan penetapan sasaran akan lebih mengarahkan pencapaian tujuan secara lebih fokus.

Sesuai dengan tujuan dalam RPJMD Provinsi NTT Tahun 2018-2023, maka tujuan dan sasaran Rencana Kerja (Renja) Provinsi NTT Tahun 2023 adalah sebagai:

**Tabel 3.1.**  
**Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan**  
**Biro Pemerintahan Setda Provinsi**

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Kinerja Tujuan/Sasaran pada Tahun ke-				Kondisi Pada Akhir Tahun Perencanaan
				Tahun Dasar 2019	2021	2022	2023	
1.	Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan umum, otonomi daerah, dan penataan urusan	Cakupan kegiatan tugas pemerintahan yang dilaksanakan setiap tahun	100%	100%	100%	100 %	100%
			Cakupan kegiatan otonomi daerah yang dilaksanakan setiap tahun	100%	100%	100%	100 %	100%
			Cakupan kegiatan penataan urusan yang dilaksanakan setiap tahun	100%	100%	100%	100 %	100%
2.	Peningkatan pelaksanaan fasilitasi kerja sama	Meningkatnya pelaksanaan fasilitasi kerja sama daerah	Cakupan kerja sama daerah yang difasilitasi setiap tahun	100%	100%	100%	100 %	100%
3.	Peningkatan pelayanan kesejahteraan rakyat	Meningkatnya pelayanan kesejahteraan rakyat	Persentase peningkatan pelayanan kesejahteraan rakyat (kegiatan di bidang kesejahteraan rakyat yang dilaksanakan)	96,15%	100%	100%	100 %	100%

### 3.3. Program dan Kegiatan

Uraian rumusan program dan kegiatan Biro Pemerintahan Setda Provinsi NTT Tahun 2023 dan prakiraan maju Tahun 2023 dapat dijelaskan pada tabel di bawah ini:

**Tabel 3.2.**  
**Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Biro Pemerintahan Setda Provinsi NTT Tahun 2023 dan Prakiraan Maju Tahun 2024**

Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Parkiraan Maju Rencana Tahun 2024	
			Lokasi	Target	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
	<b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi</b>	<b>Terlaksananya pelaksanaan kegiatan dalam rangka menunjang urusan pemerintahan</b>	<b>Kota Kupang</b>	<b>100%</b>	<b>503.690.640.</b>	<b>APBD</b>		<b>100%</b>	<b>503.690.640.</b>
	1. Perencanaan, penganggaran, dan evaluasi perangkat daerah	Tersedianya dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja	Kota Kupang	5 dokumen	54.549.540	APBD		5 dokumen	54.549.540
	2. Administrasi kepegawaian perangkat daerah	Terlaksananya administrasi kepegawaian	Kota Kupang	12 bulan	25.000.000	APBD		2 orang	25.000.000
	3. Administrasi Umum Perangkat daerah	Terlaksananya kegiatan administrasi umum di Biro Pemerintahan	Kota Kupang	12 bulan	177.451.900	APBD		12 dokumen	177.451.900
	4. Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Tersedianya barang penunjang urusan pemerintahan	Kota Kupang	10 unit	84.000.000	APBD		4 unit	84.000.000

Rencana Kerja Tahun 2022 Biro Pemerintahan Setda Provinsi NTT

	5. Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintahan	Kota Kupang	12 bulan	34.401.600	APBD		12 dokumen	34.401.600
	6. Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	Terlaksananya pemeliharaan barang milik daerah	Kota Kupang	12 bulan	40.000.000	APBD		12 dokumen	40.000.000
	<b>Program Pemerintahan dan Otonomi Daerah</b>	<b>1. Cakupan kegiatan tugas pemerintahan yang dilaksanakan setiap tahun</b>	<b>Kota Kupang</b>	<b>100%</b>	<b>165.000.000</b>	<b>APBD</b>		<b>100%</b>	<b>200.000.000</b>
	Kegiatan Pelaksanaan Tugas Pemerintahan	Jumlah tugas pemerintahan yang dilaksanakan dalam satu tahun	Kota Kupang	8 Kegiatan	165.000.000	APBD		8 Kegiatan	200.000.000
	<b>Program Pemerintahan dan Otonomi Daerah</b>	<b>2. Cakupan kegiatan otonomi daerah yang dilaksanakan setiap tahun</b>	<b>Kota Kupang</b>	<b>100%</b>	<b>385.000.000</b>	<b>APBD</b>		<b>100%</b>	<b>450.000.000</b>
	Kegiatan Pelaksanaan Otonomi Daerah	Jumlah tugas otonomi daerah, evaluasi, dan penyelenggaraan pemerintahan yang dilaksanakan dalam satu tahun	Kota Kupang	10 Kegiatan	385.000.000	APBD		10 Kegiatan	450.000.000



Rencana Kerja Tahun 2022 Biro Pemerintahan Setda Provinsi NTT

	<b>Program Pemerintahan dan Otonomi Daerah</b>	<b>3. Cakupan kegiatan penataan urusan yang dilaksanakan setiap tahun</b>	<b>Kota Kupang</b>	<b>100%</b>	<b>90.000.000</b>	APBD		<b>100%</b>	<b>150.000.000</b>
	Kegiatan Pelaksanaan Otonomi Daerah	Jumlah tugas penataan urusan yang dilaksanakan dalam satu tahun	Kota Kupang	10 Kegiatan	90.000.000	APBD		10 Kegiatan	150.000.000
	<b>Program Pemerintahan dan Otonomi Daerah</b>	<b>4. Cakupan kerja sama daerah yang difasilitasi setiap tahun</b>	<b>Kota Kupang</b>	<b>100%</b>	<b>436.003.000</b>	<b>APBD</b>		<b>100%</b>	<b>500.000.000</b>
	Kegiatan Fasilitasi Kerjasama Daerah	Jumlah fasilitasi kerja sama yang dilaksanakan dalam satu tahun	Kota Kupang	16 Kegiatan	436.003.000	APBD		16 Kegiatan	500.000.000
	<b>Program Kesejahteraan Rakyat</b>	<b>Persentase peningkatan pelayanan kesejahteraan rakyat (kegiatan di bidang kesejahteraan rakyat yang dilaksanakan)</b>	<b>Kota Kupang</b>	<b>100%</b>	<b>13.046.546.100</b>	<b>APBD</b>		<b>100%</b>	<b>20.000.000.000</b>
	Kegiatan Fasilitasi Pembinaan Mental Spiritual	Jumlah fasilitasi kegiatan keagamaan yang dilaksanakan dalam satu tahun	Kota Kupang	8 Kegiatan	4.686.546.100	APBD		10 Kegiatan	10.000.000.000

	Kegiatan Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar	Jumlah fasilitasi, koordinasi, sinkronisasi, dan evaluasi kegiatan bidang pelayanan dasar	Kota Kupang	6 Kegiatan	6.560.000.000	APBD		8 Kegiatan	6.000.000.000
	Kegiatan Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Non Dasar	Jumlah fasilitasi, koordinasi, sinkronisasi, dan evaluasi kegiatan bidang non pelayanan dasar	Kota Kupang	6 Kegiatan	1.800.000.000	APBD		6 Kegiatan	4.000.000.000

Biro Pemerintahan Setda Provinsi NTT Tahun 2023 merencanakan anggaran sebesar Rp14.626.739.740,00 untuk melaksanakan sebanyak 3 program dan 13 kegiatan. Sejauh ini dinamika yang terjadi sudah disikapi ke dalam perencanaan program dan anggaran.



## **BAB IV**

## **RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**

Rencana Kerja merupakan dokumen tahunan yang berpedoman pada dokumen Renstra Perangkat Daerah, dan mengacu pada RKPD. Pada Tahun Anggaran 2023, Biro Pemerintahan Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur akan melaksanakan 3 program dan 13 kegiatan. Keseluruhan rencananya akan dibiayai dengan skema anggaran APBD. Lebih jelasnya berikut Rencana Kinerja Tahunan (RKT) 2023 yang akan dilaksanakan oleh Biro Pemerintahan Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Biro Pemerintahan Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur pada khususnya dan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur pada umumnya.

Total pagu indikatif Renja Biro Pemerintahan Tahun 2023 sebesar Rp. 14.626.739.740,00, selengkapnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 4.1.

## Usulan Biro Pemerintahan Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2023

NO	KODE	URAIAN URUSAN / BIDANG / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN / USULAN	TOLAK UKUR KINERJA	TARGET KINERJA	JUMLAH PAGU (Rp)
1	2	3	4	5	7
	<b>4</b>	<b>UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN</b>			<b>14.626.739.740,00</b>
	<b>4.01</b>	<b>SEKRETARIAT DAERAH</b>			<b>14.626.739.740,00</b>
	<b>4.01.01</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH</b>			<b>503.690.640,00</b>
	4.01.01.1.01	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			<b>54.549.540,00</b>
	4.01.01.1.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD			<b>5.500.000,00</b>
		- Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	5.500.000,00
	4.01.01.1.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD			<b>5.274.640,00</b>
		- Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	5.274.640,00
	4.01.01.1.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			<b>1.775.000,00</b>
		- Penyusunan laporan realisasi keuangan	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	12 Laporan	1.775.000,00
	4.01.01.1.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			<b>41.999.900,00</b>
		- Penyusunan LKPJ, LKIP, dan Laporan Tahunan Biro Pemerintahan Tahun 2021	Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah (LKPJ, LKIP, Laporan Tahunan, Laporan Kinerja Semester, Laporan Kinerja Triwulan	5 Laporan	41.999.900,00
	4.01.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			<b>25.000.000,00</b>

Rencana Kerja Tahun 2022 Biro Pemerintahan Setda Provinsi NTT

4.01.01.1.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi			<b>25.000.000,00</b>
	- Pendidikan dan pelatihan luar daerah (Diklat pengadaan barang dan jasa)	Jumlah PNS yang mengikuti pendidikan dan pelatihan berdasarkan tugas dan fungsi	2 orang	0,00
4.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			25.000.000,00
4.01.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan			<b>177.451.900,00</b>
	- Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	2 paket	<b>20.153.100,00</b>
4.01.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan			20.153.100,00
	- Penyediaan bahan bacaan	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan Perundang-Undangan yang disediakan	36 dokumen	<b>4.492.800,00</b>
4.01.01.1.06.07	Penyediaan Bahan/Material			4.492.800,00
	- Alat Kebersihan dan bahan kebersihan	Jumlah paket alat kebersihan dan bahan kebersihan	1 paket	<b>27.000.000,00</b>
	- Alat Tulis Kantor	Jumlah paket ATK	1 paket	5.000.000,00
4.01.01.1.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu			22.000.000,00
	- Fasilitasi kunjungan tamu	Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	12 laporan	<b>15.000.000,00</b>
4.01.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			15.000.000,00
	- Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi	22 laporan	<b>110.806.000,00</b>
4.01.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			110.806.000,00
4.01.01.1.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			<b>84.000.000,00</b>
	- Pengadaan Paket meeting room	Tersedianya paket meeting room	1 paket	<b>84.000.000,00</b>
4.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			84.000.000,00
4.01.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			<b>122.689.200,00</b>
	- Penyediaan jasa surat menyurat	Tersedianya jasa surat menyurat	12 bulan	<b>14.937.600,00</b>
				14.937.600,00
4.01.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			
	- Jasa komunikasi (internet)	Tersedianya jasa internet	12 bulan	<b>34.401.600,00</b>
4.01.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			34.401.600,00

Rencana Kerja Tahun 2022 Biro Pemerintahan Setda Provinsi NTT

		- Jasa pengelola keuangan	Tersedianya jasa pengelola keuangan	4 orang	73.350.000,00
		- Jasa pengurus barang	Tersedianya jasa pengurus barang	1 orang	48.120.000,00
		- Jasa PPTK dan Pejabat Pengadaan	Tersedianya jasa PPTK dan Pejabat Pengadaan	2 orang	4.950.000,00
	4.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			20.280.000,00
	4.01.01.1.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan - Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	Tersedianya jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	12 bulan	40.000.000,00 30.000.000,00
	4.01.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			30.000.000,00
		- Pemeliharaan peralatan mesin lainnya	Tersedianya jasa pemeliharaan komputer dan printer	12 bulan	10.000.000,00
	<b>4.01.03</b>	<b>PROGRAM PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH</b>			10.000.000,00
	4.01.03.1.01	Pelaksanaan Tugas Pemerintahan			1.076.503.000,00
	4.01.03.1.01.01	Pengelolaan Administrasi Kebijakan Pemerintahan			165.000.000,00
		- Inventarisasi aset bekas milik asing di Provinsi NTT	Terlaksananya dokumen inventarisasi aset milik asing di Provinsi NTT		0,00
		- Rapat koordinasi Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)	Terlaksananya Rapat koordinasi Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)		0,00
	4.01.03.1.01.02	Fasilitasi Pelaksanaan Pemerintahan Umum			0,00
		- Inventarisasi masalah-masalah pemerintahan umum di kabupaten/kota	Tersedianya dokumen inventarisasi masalah-masalah pemerintahan umum di kabupaten/kota		0,00
		- Rapat koordinasi forum komunikasi pimpinan daerah (Forkopimda) Provinsi	Terlaksananya Rapat koordinasi forum komunikasi pimpinan daerah (Forkopimda) Provinsi		0,00
		- Rapat koordinasi pemerintahan umum	Terlaksananya Rapat koordinasi pemerintahan umum		0,00
	4.01.03.1.01.03	Fasilitasi Penataan Wilayah			0,00

Rencana Kerja Tahun 2022 Biro Pemerintahan Setda Provinsi NTT

		- <i>Fasilitasi pemekaran kelurahan/kecamatan</i>	<i>Terlaksananya fasilitasi pemekaran kelurahan/kecamatan</i>	6 kabupaten	<b>165.000.000,00</b>
		- <i>Fasilitasi penyelesaian batas daerah</i>	<i>Terlaksananya penyelesaian batas daerah</i>	4 kabupaten	50.000.000,00
		- <i>Koordinasi pendataan dan verifikasi unsur rupa bumi</i>	<i>Terlaksananya koordinasi pendataan dan verifikasi unsur rupa bumi</i>	6 kabupaten	50.000.000,00
		- <i>Penyusunan Profil Kecamatan</i>	<i>Tersedianya dokumen profil kecamatan</i>	1 dokumen	60.000.000,00
	4.01.03.1.02	Pelaksanaan Otonomi Daerah			5.000.000,00
	4.01.03.1.02.01	Fasilitasi Administrasi Kepala Daerah dan DPRD			<b>475.500.000,00</b>
		- <i>Fasilitasi Administrasi dan Pelantikan Penjabat Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah pada 3 Kabupaten/ Kota</i>	<i>Terlaksananya Fasilitasi Administrasi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah pada ...Kabupaten/ Kota</i>	3 kali	<b>185.500.000,00</b>
		- <i>Fasilitasi administrasi kunjungan kerja Anggota DPD RI dan DPR RI ke NTT</i>	<i>Terlaksananya Fasilitasi administrasi kunjungan kerja Anggota DPD RI dan DPR RI ke NTT</i>		90.000.000,00
		- <i>Fasilitasi administrasi Penetapan Keputusan Tentang PAW Anggota DPRD Kabupaten/ Kota</i>	<i>Tersedianya dokumen Surat Keputusan tentang PAW</i>	1 kegiatan	0,00
		- <i>Fasilitasi administrasi pengusulan pensiun pejabat negara</i>	<i>Tersedianya dokumen administrasi pengusulan pensiun pejabat negara</i>	3 kali	18.500.000,00
		- <i>Fasilitasi administrasi usulan ijin luar negeri Kepala Daerah dan Anggota DPRD Provinsi</i>	<i>Terlaksananya fasilitasi administrasi usulan ijin luar negeri Kepala Daerah dan Anggota DPRD Provinsi</i>	1 kegiatan	30.000.000,00
		- <i>Fasilitasi Adminsitasi Pengusulan Penggantian Antarwaktu (PAW) Anggota DPRD Provinsi NTT</i>	<i>Tersedianya dokumen Surat Keputusan Penggantian Antarwaktu (PAW) Anggota DPRD Provinsi NTT</i>	1 kegiatan	1.000.000,00
		- <i>Fasilitasi Pelantikan penjabat Gubernur Provinsi NTT</i>	<i>Terlaksananya pelantikan penjabat Gubernur Nusa Tenggara Timur</i>	1 kegiatan	1.000.000,00
		- <i>Rapat Kerja Gubernur dengan para Bupati/ Walikota se-NTT</i>	<i>Terlaksananya rapat kerja Gubernur NTT dengan para Bupati/ Walikota se-NTT</i>		45.000.000,00
	4.01.03.1.02.02	Pengembangan Otonomi dan Penataan Urusan			0,00
		- <i>Inventarisasi Pengembangan Otonomi Daerah</i>	<i>terlaksananya kegiatan inventarisasi pengembangan otonomi daerah</i>	6 kabupaten	<b>90.000.000,00</b>



Rencana Kerja Tahun 2022 Biro Pemerintahan Setda Provinsi NTT

		- Inventarisasi pemetaan urusan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota	Terlaksananya kegiatan pemetaan urusan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota	6 kabupaten	45.000.000,00
		- Fasilitasi dan koordinasi penyelenggaraan peringatan hari jadi provinsi NTT	Terlaksananya fasilitasi dan koordinasi penyelenggaraan peringatan hari jadi provinsi NTT		45.000.000,00
		- Rapat koordinasi kebijakan pengembangan otonomi daerah	Terlaksananya koordinasi kebijakan pengembangan otonomi daerah		0,00
	4.01.03.1.02.03	Evaluasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan			0,00
		- Penyusunan LKPJ Tahun 2021	Tersedianya dokumen LKPJ Tahun 2021	1 dokumen	<b>200.000.000,00</b>
		- Penyusunan LPPD Tahun 2021	Tersedianya dokumen LPPD Tahun 2021	1 dokumen	50.000.000,00
		- Penyusunan RLPPD dan Nota Pengantar LKPJ Tahun 2021	Tersedianya dokumen RLPPD dan Nota Pengantar LKPJ Tahun 2021	3 Paket	70.000.000,00
		- Penyusunan Self Assessment LPPD Tahun 2021	Tersedianya dokumen self assessment LPPD Tahun 2021	1 kegiatan	50.000.000,00
		- Penyusunan SPM Tahun 2021	Tersedianya dokumen SPM Tahun 2021	1 dokumen	10.000.000,00
	4.01.03.1.03	Fasilitasi Kerja Sama Daerah			20.000.000,00
	4.01.03.1.03.01	Fasilitasi Kerjasama antar Pemerintah			<b>436.003.000,00</b>
		- Monitoring dan evaluasi lembaga mitra internasional dan pembinaan kerja sama di kabupaten/kota	Terlaksananya Monitoring dan evaluasi lembaga mitra internasional dan pembinaan kerja sama di kabupaten/kota		<b>149.000.000,00</b>
		- Monitoring dan evaluasi program Inovasi	Terlaksananya Monitoring dan evaluasi program Inovasi	5 kabupaten	50.000.000,00
		- Pembayaran iuran Apsi	Terlaksananya pembayaran iuran Apsi tahun 2021 dan 2022	1 paket	44.000.000,00
		- Pembayaran Iuran MPU	Terlaksananya pembayaran iuran MPU tahun 2021 dan 2022	1 paket	0,00
		- Koordinasi kebijakan kerja sama daerah dengan Pemerintah Pusat	Terlaksananya koordinasi kerja sama dengan pemerintah pusat	3 kali	0,00
		- Tim Working Group Peace Corps Tk. Provinsi NTT	Terlaksananya rapat Tim Working Group Peace Tk. Provinsi NTT		35.000.000,00
	4.01.03.1.03.02	Fasilitasi Kerjasama Badan Usaha/Swasta			20.000.000,00
		- Rapat pembahsan perjanjian kerja sama	Terlaksananya rapat koordinasi kerja sama badan usaha/swasta	60 kali	<b>42.003.000,00</b>

Rencana Kerja Tahun 2022 Biro Pemerintahan Setda Provinsi NTT

4.01.03.1.03.03	Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama			42.003.000,00
	- Honor Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah	Terlaksananya kegiatan koordinasi Kerja Sama Daerah	12 bulan	245.000.000,00
	- Pengambilan data potensi daerah untuk data kerja sama	Tersedianya data potensi daerah untuk data kerja sama	22 kabupaten/kot a	165.000.000,00
<b>4.01.04</b>	<b>PROGRAM KESEJAHTERAAN RAKYAT</b>			80.000.000,00
4.01.04.1.01	Fasilitasi Pembinaan Mental Spiritual			13.046.546.100,00
4.01.04.1.01.01	Pengelolaan Sarana dan Prasarana Spiritual			4.686.546.100,00
	- Bantuan Sosial sarana dan prasarana spiritual	Tersedianya dana bantuan sosial bidang keagamaan	1 paket	1.100.000.000,00
	- Monitoring bantuan hibah dan bansos bidang agama	Tersedianya dana bantuan sosial bidang keagamaan	1 paket	1.000.000.000,00
				100.000.000,00
4.01.04.1.01.02	Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual			
	- Buka Puasa Bersama	Terlaksananya buka puasa bersama	1 kegiatan	3.586.546.100,00
	- Koordinasi pelaksanaan kebijakan pemerintah bidang Agama di kabupaten/kota se NTT	Terlaksananya Monitoring dan evaluasi perumusan kebijakan pemerintah daerah kabupaten se- daratan Sumba terkait hasil rekomendasi pelaksanaan kegiatan Temu Pemuda Lintas Agama(4 kabupaten)	22 kabupaten/kot a	40.000.000,00
	- Dialog Pemerintah Provinsi NTT dengan Lembaga Keagamaan	Terlaksananya Dialog Pemerintah Provinsi NTT dengan Lembaga Keagamaan	1 kegiatan	90.000.000,00
	- Halal Bihalal	Terlaksananya Halal Bihalal	1 kegiatan	120.000.000,00
	- Hari Raya Idul Adha	Terlaksananya pendampingan penyerahan hewan kurban dalam rangka Hari Raya Idul Adha	1 kegiatan	40.000.000,00
	- Hari Raya Nyepi	Terlaksananya perayaan hari Raya Nyepi	1 kegiatan	68.546.100,00
	- Hari Raya Waisak	Terlaksananya perayaan Hari Raya Waisak	1 kegiatan	40.000.000,00

Rencana Kerja Tahun 2022 Biro Pemerintahan Setda Provinsi NTT

		- Natal Oikumene Lingkup Pemerintah Provinsi NTT	Terlaksananya Natal Oikumene lingkup Pemerintah Provinsi NTT	1 kegiatan	40.000.000,00
		- Paskah Oikumene	Tersedianya tiket PP bagi peziarah Pekan Suci Semana Santa	1 kegiatan	60.000.000,00
		- Penyelenggaraan Urusan Haji	Terlaksananya pelepasan dan penjemputan jamaah haji	2 kali	40.000.000,00
		- Hibah Lembaga Keagamaan	Tersedianya dana hibah bagi lembaga non pemerintah	1 paket	48.000.000,00
	4.01.04.1.02	Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar			3.000.000.000,00
	4.01.04.1.02.01	Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pendidikan			<b>6.560.000.000,00</b>
		- Fasilitasi Dokumen Study Kelayakan Sekolah Tinggi Pariwisata	Terlaksananya fasilitasi Dokumen Study Kelayakan Sekolah Tinggi Pariwisata		<b>3.340.000.000,00</b>
		- Koordinasi pelaksanaan kebijakan pemerintah bidang Pendidikan di kabupaten/kota se NTT	Terlaksananya Monitoring dan evaluasi pelaksanaan koordinasi kebijakan bidang pendidikan di kabupaten/kota	22 kabupaten/kota	0,00
		- Rakor Perguruan Tinggi Negeri dan Swasta se NTT	Terlaksananya Rakor Perguruan Tinggi Negeri dan Swasta se Flores	1 kegiatan	90.000.000,00
		- Studi Kelayakan dan Operasional Sekolah Tinggi Pariwisata	Terlaksananya Studi Kelayakan dan Operasional Sekolah Tinggi Pariwisata		150.000.000,00
		- Bantuan Sosial bidang pendidikan	Tersedianya bantuan sosial bidang pendidikan	1 paket	0,00
		- Monitoring hibah dan bansos bidang pendidikan	Tersedianya bantuan sosial bidang pendidikan	1 paket	3.000.000.000,00
	4.01.04.1.02.02	Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kesehatan			100.000.000,00
		- Advokasi Tim Pembina UKS di Kabupaten/Kota se Provinsi NTT	Terlaksananya Advokasi Tim Pembina UKS di Kabupaten/Kota se Provinsi NTT	22 kabupaten/kota	<b>354.000.000,00</b>
		- Honorarium Tim Pim Pembina UKS di Kabupaten/Kota se Provinsi NTT	Terlaksananya kegiatan Pembinaan UKS/M tingkat Provinsi NTT	12 bulan	90.000.000,00

Rencana Kerja Tahun 2022 Biro Pemerintahan Setda Provinsi NTT

		- Koordinasi pelaksanaan kebijakan pemerintah bidang kesehatan di kabupaten/kota	Terlaksananya Monitoring dan evaluasi pelaksanaan koordinasi kebijakan bidang kesehatan di kabupaten/kota	22 kabupaten/kota	110.000.000,00
		- Rapat koordinasi dan evaluasi kebijakan bidang kesehatan	Terlaksananya Rapat koordinasi dan evaluasi pelaksanaan kebijakan bidang kesehatan	2 kali	90.000.000,00
		- Rapat Koordinasi Tim Pembina UKS/M Provinsi	Terlaksananya Rapat Koordinasi Pembina UKS/M provinsi	4 kali	24.000.000,00
	4.01.04.1.02.03	Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Sosial			40.000.000,00
		- Verifikasi Hibah dan Bantuan Sosial	Terlaksananya verifikasi hibah dan bantuan sosial	1 paket	<b>2.866.000.000,00</b>
		- Bantuan Sosial bidang sosial	Tersedianya anggaran bantuan sosial bidang sosial	1 paket	1.866.000.000,00
		- Bantuan Hibah bidang sosial	Tersedianya anggaran bantuan hibah bidang sosial	2 paket	1.000.000.000,00
	4.01.04.1.03	Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar			<b>1.800.000.000,00</b>
	4.01.04.1.03.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata			<b>200.000.000,00</b>
		- Fasilitasi Hari Kesaktian Pancasila	Terlaksananya kegiatan Hari Kesaktian Pancasila	1 kegiatan	25.000.000,00
		- Fasilitasi Hari Lahir Pancasila	Terlaksananya kegiatan Hari Lahir Pancasila	1 kegiatan	25.000.000,00
		- Fasilitasi Hari Sumpah Pemuda	Terlaksananya kegiatan Hari Sumpah Pemuda	1 kegiatan	25.000.000,00
		- Fasilitasi HUT Proklamasi RI	Terlaksananya kegiatan HUT RI	1 kegiatan	100.000.000,00
		- Rapat koordinasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata	Terlaksananya Rapat koordinasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata		0,00

Rencana Kerja Tahun 2022 Biro Pemerintahan Setda Provinsi NTT

4.01.04.1.03.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Transmigrasi dan Tenaga Kerja				<b>1.600.000.000,00</b>
	- Peningkatan Kapasitas Dharma Wanita	Terlaksananya kegiatan peningkatan kapasitas DWP Provinsi NTT	1 paket		250.000.000,00
	- Bantuan sosial bidang non pelayanan dasar	Tersedianya anggaran bantuan sosial bidang non pelayanan dasar	1 paket		1.250.000.000,00
	- Monitoring hibah dan bansos bidang non pelayanan dasar	Tersedianya anggaran bantuan sosial bidang non pelayanan dasar	1 paket		100.000.000,00
4.01.04.1.03.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Komunikasi, Informatika, Statistik, Persandian, dan Perhubungan				<b>0,00</b>
	- Monitoring dan evaluasi kebijakan bidang Non Pelayanan Dasar	Terlaksananya Monitoring dan evaluasi kebijakan bidang Non Pelayanan Dasar			0,00
	- Rapat Koordinasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Komunikasi, Informatika, Statistik, Persandian, dan Perhubungan	Terlaksananya Rapat Koordinasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Komunikasi, Informatika, Statistik, Persandian, dan Perhubungan			0,00
<b>JUMLAH</b>					<b>14.626.739.740,00</b>

**BAB  
V**

**P E N U T U P**

Rencana Kerja (Renja) Biro Pemerintahan Setda Provinsi NTT Tahun 2023 mengacu pada rancangan awal RKPD. Rancangan RKPD disusun berpedoman pada RPJMD Tahun 2018-2023 dan mengacu pada RPJMN 2020-2024. Sehingga Rancangan Renja ini disusun dengan berpedoman pada Rancangan Awal RKPD 2023.

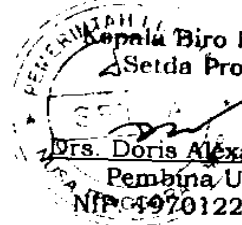
Rancangan Renja 2023 ini merupakan gambaran kinerja Biro Pemerintahan Setda Provinsi NTT dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi. Rancangan Renja 2023 diharapkan dapat memudahkan Biro Pemerintahan Setda Provinsi NTT dalam menyusun rencana kegiatan dan program tahunan secara terpadu, terarah dan terukur; menyediakan acuan resmi bagi Biro Pemerintahan Setda Provinsi NTT dalam menentukan prioritas program dan kegiatan tahunan daerah yang dibiayai dari APBD; memudahkan Biro Pemerintahan Setda Provinsi NTT dalam memahami dan menilai prioritas, sasaran, dan program- program operasional tahunan, serta sebagai tolok ukur bagi evaluasi dan penilaian kinerja Biro Pemerintahan Setda Provinsi NTT.

Pada tahun anggaran 2023, Biro Pemerintahan Setda Provinsi NTT mengusulkan 3 Program dan 13 kegiatan yang kegiatan yang dibiayai APBD dengan Penganggaran sebesar Rp. Rp 14.626.739.740,00. Di antara ketiga program tersebut terdapat 1 (satu) program bersifat pelayanan langsung kepada masyarakat, yakni Program Kesejahteraan Rakyat dimana terdapat bantuan

Hibah dan Bantuan Sosial kepada lembaga dan masyarakat.

Pada akhirnya, dalam mencapai target program dan kegiatan di Tahun 2023, Biro Pemerintahan membutuhkan dukungan dan kerja sama dari berbagai pihak, sebagai bagian dari pelaksanaan pembangunan di Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Kupang, April 2022

  
Kepala Biro Pemerintahan  
Setda Provinsi NTT,  
Drs. Doris Alexander Rihj, M.Si  
Pembina Utama Muda  
NIP. 6197012291990031005